

**KEDUDUKAN HARTA BAWAAN SETELAH MENINGGAL
DUNIA DITINJAU MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
(Studi di Kecamatan Kampar Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat-syarat dan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**



ADDINAL KHAIRI
NIM : 10421025016

PROGRAM S1

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“KEDUDUKAN HARTA BAWAAN SETELAH MENINGGAL DUNIA DITINJAU MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar)”**.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang aturan adat mengenai harta bawaan dimana harta ini tidak dikenal di dalam hukum waris Islam.

Harta bawaan adalah harta benda milik suami yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan baik diperoleh melalui penghibaan, warisan dan wasiat atau hasil dari usaha sendiri. Apabila suami meninggal dunia maka harta ini dikembalikan kepada pihak keluarga (orang tua atau kemenakan) dan bukan menjadi hak isteri sebagaimana pepatah adat *“Baghang yang ditopekti tinge, baghang yang dibaghak tobo, kok ado keuntungan dibagi”*.

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah tentang bagaimana kedudukan harta bawaan setelah meninggal dunia, realisasi aturan adat tentang harta bawaan di Kecamatan Kampar Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut.

Populasi dari penelitian ini adalah para ninik mamak dan masyarakat Kecamatan Kampar Timur yang berada di bawah payung adat Kenegerian Kampar. Ninik mamak yang ada di daerah ini berjumlah 8 orang dan 7 orang masyarakat yang pernah melaksanakan atau melalui pembagian harta bawaan sejak tahun 2005.

Dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden, dengan cara mewawancarai para ninik mamak yang ada di Kecamatan Kampar Timur dan masyarakat yang pernah melaksanakan atau melalui pembagian harta bawaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informan yang ada hubungannya dengan judul yang diteliti. Selain itu, juga diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan mengkaji kitab-kitab dan literature yang ada kaitannya dengan permasalahan ini dan dari ulama setempat.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, deduktif dan deskriptif analitis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang aturan adat mengenai kedudukan harta bawaan di Kecamatan Kampar Timur serta realisasinya di tengah masyarakat.

Dari penelitian ini dihasilkan suatu temuan bahwa aturan adat ini tidak sepenuhnya menjalankan aturan ini walaupun masih ada sebagian masyarakat yang menjalankannya. Ditinjau dari hukum Islam, aturan adat tentang pembagian harta bawaan tidak sesuai dengan syari'at.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<i>Abstrak</i>	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	Vi
Daftar Tabel	xi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
 BAB II Gambaran Umum Lokasi Penelitian	 15
A. Sejarah Singkat	15
B. Geografi dan Demografi	17
C. Agama	19
D. Pendidikan	22
E. Sosial Budaya dan Adat Istiadat	24
 BAB III Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam	 28
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Kewarisan Islam	28
B. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	39
C. Ahli Waris dan Pembagiannya	48
 BAB IV Kedudukan Harta Bawaan Setelah Meninggal Dunia Dalam Adat Kecamatan Kampar Timur Ditinjau Menurut Hukum Islam...	 68
A. Kedudukan Harta Bawaan Setelah Meninggal Dunia Dalam Adat Kecamatan Kampar Timur	 68
B. Realisasi dan Pelaksanaannya	73
C. Tinjauan hukum Waris Islam	78
 BAB V Kesimpulan dan Saran	 86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
 Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Kampar Timur merupakan salah satu Kecamatan yang terletak dalam wilayah Kabupaten Kampar. Memang dilihat dari segi nama, Kecamatan ini tergolong Kecamatan baru (hasil pemekaran), namun sesungguhnya wilayah Kecamatan Kampar Timur ini merupakan sebuah wilayah administratif dari Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (sebelum pemekaran) dan juga merupakan wilayah adat Kenegerian Kampar.¹

Kecamatan Kampar (Kecamatan Lama/ Induk) di samping sebagai sebuah wilayah administratif Kecamatan juga terdiri dari beberapa wilayah adat yang merupakan satu kesatuan Adat Kampar. Wilayah Adat Kenegerian Kampar mencakup beberapa desa yaitu Desa Pulau Rambai, Desa Pulau Birandang, Desa Kampar, Desa Koto Perambahan, dan sebuah desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Tambang yaitu Desa Kuapan. Namun yang termasuk wilayah Kecamatan Kampar Timur adalah Desa Pulau Pulau Rambai, Desa Pulau Birandang, Desa Kampar, Desa Koto Perambahan, dan dua buah desa hasil pemekaran pada awal tahun 2006 yaitu Desa Deli Makmur dan Desa Sungai

¹ Syamsuar (Mantan Sekdes Kampar), *wawancara*, Pulau Kampung, 3 Januari 2010.

Putih (dua desa yang dulunya berada dalam wilayah adat administratif Desa Pulau Birandang).²

Kewarisan menurut adat di Kecamatan Kampar Timur didasarkan dari sistem kekerabatan dan kehartabendaan (harta pusako yang dimiliki). Ditinjau dari segi kehidupan suami dan isteri, secara umum harta dapat dibedakan kepada harta tepatan, harta bawaan, dan harta perkawinan (bersama).

Harta Bawaan adalah harta yang dimiliki seseorang laki-laki pada masa bujangan, yang didapatkan melalui penghibaan dan wasiat atau dari usaha sendiri, maka Apabila harta tersebut dibawa ke dalam perkawinan, di dalam aturan Adat di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar diambil kembali oleh pihak keluarga dan harta tersebut diberikan kepada kemenakan ketika yang bersangkutan telah meninggal dunia.³ Ketentuan adat seperti itu biasanya tidak dibukukan (tidak dalam bentuk tertulis), akan tetapi dipegang dan dilestarikan melalui pepatah adat. Khusus mengenai persoalan ini, pepatah adat mengatakan *“baghang yang ditopekti tingge dan baghang yang dibaghak tobo kok ado keuntungan dibagi”*.

Ketentuan adat di atas dijalankan apabila ada perselisihan antara pihak keluarga isteri dan pihak keluarga suami yang telah meninggal dunia dalam hal

² Suhairi (Pegawai Kantor Camat Kampar Timur), *wawancara*, Desa Kampar, 3 Januari 2010.

³ Efendi, Dt. Marajo Besar, (Ninik Mamak Persukuan Patopang), *wawancara*, Pulau Kampung, 10 Februari 2010.

pembagian harta warisan. Akan tetapi dalam beberapa kasus ketentuan tersebut tidak dijalankan apabila terdapat kerelaan pada masing-masing pihak.

Dalam Bab ini penulis akan mengemukakan dua contoh pembagian harta bawaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kampar Timur.

Contoh yang pertama, Di Dusun III Pulau Kampung Desa Pulau Rambai, Jhoni menikah dengan seorang gadis bernama Dhila. Sebelum menikah Jhoni sudah memiliki sebuah Sepeda Motor Merk RX King. Setelah satu tahun pernikahan mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Widia. Saat Widia berumur 6 Bulan, tepat pada bulan puasa, Jhoni meninggal di RS Umum Bangkinang. Setelah 40 hari kematian Jhoni, pihak keluarga Jhoni (ayah dan ibunya) mengambil Sepeda Motor milik Jhoni di atas dan menyerahkannya kepada adik Jhoni. Dhila dan keluarganya tidak rela akan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena berpatokan kepada pepatah adat di atas, *“baghang yang ditopekti tingge dan baghang yang dibaghak tobo kok ado keuntungan dibagi”*, maka sepeda motor tersebut memang harus dikembalikan.

Kasus lain juga terjadi di Dusun III Pulau Kampung Desa Pulau Rambai. Yanti menikah dengan Yulis pada tahun 2003. ketika itu Yulis sudah memiliki Sepeda Motor Merk Honda Supra. Tahun 2006 Yulis meninggal dalam sebuah kecelakaan dan mereka belum dikaruniai anak. Setelah kematiannya keluarga Yulis tidak pernah menyinggung persoalan sepeda motor milik Yulis.

Bahkan ketika Yanti kembali berumah tangga pada tahun 2009 dengan Badul, sepeda motor tersebut dipakai oleh Badul yang

merupakan suami kedua Yanti.

Dalam Islam, permasalahan waris sudah diatur melalui ayat-ayat al-Qur'an dan

hadis Rasulullah saw. Dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.⁴

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

عنه عن النبي صلعم قال الحق الفرائض باهلها فما بقى فلاء

⁴ Depag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), cet. Pertama, h. 116.

Artinya: “Berikanlah faraidh (bagian) yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.⁵

Dari ayat-ayat dan hadis Rasulullah, para ulama menetapkan bahwa prinsip-prinsip waris dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Asas Ijbari

Asas Ijbari, secara etimologis kata “*Ijbari*” mengandung arti “*paksaan*” (*compolsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam Hukum waris berarti “terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan Hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut”. Dengan perkataan lain, adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Adanya asas Ijbari terlihat dari tiga aspek, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.⁶

2. Asas Bilateral

Asas Bilateral, yaitu suatu sistem kekerabatan yang menetapkan hubungan darah antara sesama manusia melalui ayah dan ibu (keatas) dan

⁵ Muslim, *Shahih Bukhari*, (Cairo: Darul Fikri, 1981), cet. Pertama, h. 2.

⁶ Suhra Wardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris, (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet. Pertama, h. 36.

kepada anak (laki-laki atau perempuan) dan seterusnya kebawah. Kebilateralan dalam Hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisannya dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak kerabat laki-laki dan perempuan.⁷ Asas bilateral ini didasarkan pada ayat 7, 11, 12, dan 176 surat an-Nisa’.

3. Asas Individual

Asas Individual, yaitu harta warisan mesti dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Asas ini asas ini berkaitan langsung dengan asas Ijbari, bahwa bila terbuka harta warisan mesti langsung diadakan pembagian kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan.⁸

Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqh disebut “ahliyatul al-wujub”.⁹ Sifat Individual dalam kewarisan Islam dapat dikaji dalam aturan-aturan al-Qur’an ayat 7 surat an-Nisa’.

4. Asas Keadilan

⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Kedua, h. 19.

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1979), cet. Pertama, h. 135.

⁹ *Ibid.*

Asas Keadilan, yaitu keadilan antara hak dan kewajiban serta keadilan antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Asas Keadilan ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dan antara yang diperoleh seseorang. Misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, bahwa harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.¹⁰ Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga dan mencukupi keperluan anak isterinya.

5. Asas Kematian

Asas ini menyatakan bahwa peralihan harta dari seseorang kepada orang lain atas nama kewarisan berlaku sesudah matinya pemilik harta. Asas ini

¹⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 23.

berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama pemilik harta masih hidup.

Di samping itu Islam juga menetapkan siapa yang berhak menerima warisan, Ahli waris secara garis besar bisa dibagi tiga :

1. Ahli Waris *Ashabul Furud* yaitu bahwa bagian-bagian ahli waris yang sudah ditetapkan atau ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadits.
2. Ahli Waris *Ashabah*. Asabah menurut bahasa adalah berarti semua sahabat seorang laki-laki yang berasal dari ayah karena mereka merupakan orang-orang yang menghalangi atau melindungi atau ahli waris yang tidak mempunyai bagian tetap tertentu baik yang diatur dalam al-Qur'an maupun Hadits.
3. Ahli Waris *Zawil Arham*. Zawil arham adalah sebutan seseorang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang akibat adanya hubungan darah. Secara umum *Zawil Arham* mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik yang termasuk ahli waris golongan ashabul furud, asabah maupun golongan lain.

Dari pemaparan di atas, secara sepintas terlihat adanya perbedaan yang mendasar antara aturan adat Kecamatan Kampar Timur dengan ajaran agama Islam dalam kewarisan khususnya yang berhubungan dengan harta bawaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Menurut aturan adat, harta bawaan merupakan hak milik untuk pihak keluarga yang meninggal, seperti

saudara dan keponakan. Dengan arti kata, harta bawaan tidak menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warits yang berhak menerimanya.

Dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul: **“KEDUDUKAN HARTA BAWAAN SETELAH MENINGGAL DUNIA DI TINJAU MENURUT HUKUM WARIS ISLAM” (Studi di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar).**

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dan keterbatasan waktu dan biaya, serta untuk menghasilkan tingkat validitas yang tinggi dan kupasan yang lebih mendalam, maka dalam tulisan ini permasalahan yang dibahas difokuskan kepada : *"Kedudukan Harta Bawaan Setelah Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Waris Islam" (di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar)*

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pembatasan masalah di atas, peneliti merumuskan dan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan harta bawaan setelah meninggal dunia menurut adat di Kecamatan Kampar Timur ?
2. Bagaimana realisasi pelaksanaannya di Kecamatan Kampar Timur ?

3. Bagaimana analisis hukum waris Islam tentang kedudukan harta bawaan menurut adat di Kecamatan Kampar Timur ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana kedudukan harta awaan Setelah meninggal dunia menurut adat di Kecamatan Kampar Timur
- b. Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana realisasi dan pelaksanaannya di Kecamatan Kampar Timur
- c. Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana analisis hukum waris Islam tentang kedudukan harta bawaan setelah meninggal dunia dalam adat di Kecamatan Kampar Timur

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyyah Fakultas Syari'ah UIN Suska Riau,
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan bisa menambah literatur skripsi di Perpustakaan UIN SUSKA Riau,.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya,
- d. Agar menjadi pegangan dan pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam masalah kedudukan harta bawaan bagi masyarakat di Kecamatan Kampar Timur pada khususnya dan masyarakat yang mempunyai kesamaan adat dengan daerah Kecamatan Kampar Timur pada umumnya.

E. Metode dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Kampar Timur, lokasi ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Kampar Timur merupakan salah satu negeri yang berfalsafahkan “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*”, dengan kata lain agama dan adat merupakan pegangan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Kecamatan Kampar Timur. Kecamatan Kampar Timur juga merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar yang merupakan Serambi Mekkah Propinsi Riau,
- b. Kecamatan Kampar Timur merupakan daerah yang mudah dijangkau, dan juga tidak jauh dari pusat kota,
- c. Kecamatan Kampar Timur merupakan domisili penulis sendiri, sehingga memudahkan untuk mengumpulkan data dan melakukan observasi

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para tokoh adat, yaitu ninik mamak sebagai pemegang otoritas adat Kecamatan Kampar Timur dan masyarakat yang pernah melaksanakan atau pernah melalui pembagian harta bawaan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah kedudukan harta bawaan setelah meninggal di Kecamatan Kampar Timur.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah pimpinan adat yang ada di Kecamatan Kampar Timur berjumlah sebanyak 8 orang dan 7 orang yang pernah melaksanakan atau pernah melalui pembagian harta bawaan. Sedangkan sampel dalam penelitian adalah *total sampling*, yaitu semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari responden, dengan cara mewancarai masyarakat yang pernah terjadi dalam masalah harta bawaan milik keluarganya yang meninggal dunia dan buku-buku yang terkait dengan penelitian tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah dengan cara mewancarai para ninik mamak yang ada di Kecamatan Kampar Timur.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, penulis mengamati secara langsung bagaimana kedudukan harta bawaan setelah meninggal dunia di Kecamatan Kampar Timur.
- b. Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada ninik mamak yang dianggap sebagai orang yang punya wewenang dalam Adat di Kecamatan Kampar Timur.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknis Penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

- c. Deduktif, menggambarkan kaidah-kaidah umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut :

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua adalah membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah singkat, geografi dan demografi, agama dan pendidikan serta sosial budaya dan adat istiadat.

Bab tiga adalah membahas tentang tinjauan teoritis tentang harta bawaan yang terdiri dari pengertian dan jenis-jenis harta bawaan, dan prosedur harta bawaan.

Bab empat adalah membahas tentang kedudukan harta bawaan setelah meninggal dunia, kedudukan harta bawaan menurut adat di Kecamatan Kampar Timur, realisasi dan pelaksanaannya, harta bawaan dalam hukum waris Islam.

Bab lima adalah penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PROFIL LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Kampar Timur, dulunya dikenal dengan nama Kenegerian Kampar yang merupakan satu kenegerian dalam lingkungan wilayah Adat Andiko 44 yang mempunyai pola dan konsep adat istiadat tersendiri.¹

Kecamatan Kampar Timur dahulunya merupakan satu kesatuan daerah Kecamatan Kampar. Sebelum tahun 1977, Kecamatan Kampar dibagi menjadi lima daerah kenegerian, yaitu Kenegerian air tiris, Kenegerian Rumbio, Kenegerian Kampar, Kenegerian Tambang dan Kenegerian Terantang. Pada masa itu belum ada pembagian daerah berdasarkan desa, tetapi daerah dibagi berdasarkan kenegerian.²

Pertengahan tahun 1978, setiap kenegerian yang ada di Kecamatan Kampar dimekarkan menjadi beberapa desa. Kenegerian Kampar yang

¹ Andiko 44 adalah bentuk pemerintahan tanpa raja pada zaman dahulu yang meliputi : 5 koto di tengah (Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris dan Rumbio), 3 koto di Hilir (Kampar, Tambang dan Terantang), 10 koto di Tapung (Tandun, Talang Danto, Kasikan, Sungai Agung, Batu Gajah, Petapahan, Pantai Cermin, Bencah Kelubi, Koto Batak dan Sekojang), 4 koto di Rokan (Rokan, Pendalian, Sikibau dan Lubuk Bendera), 1 koto di Rayo (Pintu Raja), 8 koto Sitingkai (Pedadih, Kotuo, Sungai Asam, Sungai Siriolo/Sarik, Lubuk Agung, Sungai Rambai, Koto Prambanan), 13 Koto Kampar (Sibiruang, Gunung Malelo, Tabing, Tanjung, Muara Takus, Koto Tuo, Pongkai, Batu Bersurat, Tanjung Alai, Muara Mahat, Pulau Gadang dan Balung). Lihat Ali Akbar Dt. Pangeran, *Islam dan Andiko 44 Melayu Riau*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2006), h. 47.

² Syamsuar (Mantan Sekretaris Desa Kampar), *wawancara*, Desa Pulau Rambai, 28 Oktober 2008.

termasuk dalam wilayah Kecamatan Kampar dimekarkan menjadi lima desa, yaitu Desa Pulau Rambai, Desa Kampar, Desa Pulau Birandang, Desa Koto Perambahan dan Desa Kuapan.³

Pada pemekaran selanjutnya, setelah Kecamatan Tambang berdiri (pemekaran dari Kecamatan Kampar), maka Desa Kuapan termasuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Tambang. Tetapi, walaupun Desa Kuapan masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Tambang, dalam pembagian wilayah kenegerian adat, ia termasuk dalam wilayah adat Kenegerian Kampar.⁴

Pada tahun 2006, Kecamatan Kampar kembali dimekarkan menjadi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kampar (kecamatan lama), Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar Timur. Bertempat di Lapangan Bola Kaki Pasar Kampar, di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 40, Bupati Kampar meresmikan Kantor Camat Kampar Timur dengan wilayahnya meliputi Desa Kampar, Desa Pulau Birandang, Desa Pulau Rambai, Desa Koto Perambahan, Desa Deli Makmur dan Desa Sungai Putih (dua desa terakhir adalah pemekaran dari Desa Pulau Birandang).⁵ Di awal tahun 2008, Desa Kampar dimekarkan lagi menjadi empat

³ *Ibid.*

⁴ Suhairi (Staf Kantor Camat Kampar Timur), *wawancara*, Desa Sei Tarap, 29 Oktober 2008.

⁵ Kaharuddin (Ketua Tim Sukses Pemekaran Kecamatan Kampar Timur), *wawancara*, Desa Sei Tarap, 1 November 2008.

desa, yaitu Desa Kampar (desa lama), Desa Sei Tarap, Desa Sawah Baru dan Desa Tanjung Bungo.⁶

B. Geografis dan Demografis

Kecamatan Kampar Timur diberi nama sesuai dengan letaknya pada bagian timur Kecamatan Kampar (sebelum pemekaran). Kecamatan Kampar Timur secara administratif termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan orbitrasi jarak sebagai berikut :

1. Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten adalah 23 km, yang ditempuh ± 40 menit.
2. Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan dengan Pusat Pemerintahan Propinsi adalah 40 km, yang ditempuh ± 50 menit.
3. Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan dengan desa terjauh adalah 20 km, yang ditempuh ± 40 menit.

Kecamatan Kampar Timur memiliki batas wilayah dengan kecamatan sekitarnya sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tambang

⁶ Edison (Kepala Desa Sei Tarap), *wawancara*, Desa Sei Tarap, 27 Oktober 2008.

Daerah ini (Kecamatan Kampar Timur), merupakan salah satu wilayah penting di Kabupaten Kampar dilihat dari sisi perdagangan, karena menjadi daerah lalu lintas perdagangan antara Sumatera dan Riau. Luas daerah dan jumlah penduduk kecamatan Kampar dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL I
LUAS DAERAH DAN JUMLAH PENDUDUK
KECAMATAN KAMPAR TIMUR

No	Nama Desa	Luas Daerah	Jumlah Penduduk
1	Kampar	28,52 km ²	2.179 jiwa
2	Sei Tarap	5,50 km ²	1.644 jiwa
3	Tanjung Bungo	7,00 km ²	2.008 jiwa
4	Sawah Baru	5,50 km ²	1.323 Jiwa
5	Pulau Rambai	6,00 km ²	3.892 jiwa
6	Pualu Birandang	27,00 km ²	2.715 jiwa
7	Koto Perambahan	15,00 km ²	4.365 jiwa
8	Deli Makmur	18,00 km ²	1.114 jiwa
9	Sungai Putih	22,00 km ²	1.075 jiwa
Jumlah		134,22 km ²	20.415 jiwa

Kecamatan Kampar Timur merupakan Daerah Aliran Sungai Kampar yang menyebabkan pola kehidupan masyarakat di daerah ini terfokus kepada kondisi sungai tersebut, baik dalam lapangan pertanian, perikanan maupun transportasi. Namun dewasa ini, semenjak dibangunnya bendungan PLTA Koto Panjang, fungsi sungai untuk perikanan dan transportasi sudah jauh berkurang.

Karena itu, sektor pertanian menjadi andalan masyarakat di daerah ini, di samping sektor lainnya. Selain itu, sungai juga dijadikan sebagai tempat usaha penambangan batu dan pasir, tetapi belakangan ini, penambangan batu dan pasir yang dilakukan oleh masyarakat mendapat saingan dari perusahaan-perusahaan besar yang juga mengelola batu dan pasir.

Di areal sepanjang sungai Kampar inilah sebagian penduduknya membangun tempat tinggal atau pemukiman. Hampir sepanjang sungai tersebut berderetan rumah-rumah penduduk, dengan jarak antara Desa dengan Desa yang lain tidak terlalu jauh. Namun akhir-akhir perkembangan pemukiman telah mengarah ke pinggir jalan raya, yang juga menandai bergesernya pola kehidupan sebagian masyarakat dari pertanian ke perdagangan.

Bentuk bangunan rumah pada awalnya berbentuk rumah panggung, karena mengantisipasi apabila terjadi banjir, namun dalam dasawarsa terakhir ini rumah penduduk yang telah banyak dibangun permanen, terutama penduduk yang pindah ke daerah dekat pasar dan jalan raya.

C. Agama

Dalam masalah agama di daerah ini, terutama penduduk asli 100 % beragama Islam, dan yang beragama di luar Islam hanya sebagian masyarakat pendatang seperti transmigran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL II**JUMLAH PEMELUK AGAMA DI KECAMATAN KAMPAR TIMUR**

No.	Desa	Islam	Kristen	Budha/Hindu
1	Kampar	2.126 jiwa	53 jiwa	-
2	Sei Tarap	1.644 jiwa	-	-
3	Tanjung Bungo	2.008 jiwa	-	-
4	Sawah Baru	1.323 Jiwa	-	-
5	Pulau Rambai	3.892 jiwa	-	-
6	Pulau Birandang	2.715 jiwa	-	-
7	Koto Perambahan	4.365 jiwa		
8	Deli Makmur	1.114 jiwa		
9	Sungai putih	1.075 jiwa		
Jumlah		20.415 jiwa	53 jiwa	-

Sumber: Kantor Camat Kampar Timur, Data Desember 2008

Masyarakat Kecamatan Kampar Timur termasuk penganut agama yang kuat, hal ini dapat dilihat bahwa hampir setiap kampung atau desa mempunyai beberapa masjid dan mushalla yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan upacara-upacara keagamaan lainnya, termasuk pula tempat pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan perbaikan kampung. Jumlah mesjid di Kecamatan Kampar Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL III
KOMPOSISI JUMLAH SARANA IBADAH DI KECAMATAN KAMPAR
TIMUR

No	Nama Desa	Mesjid	Surau
1	Kampar	3 buah	4 buah
2	Sei Tarap	2 buah	2 buah
3	Tanjung Bungo	2 buah	4 buah
4	Sawah Baru	1 buah	2 buah
5	Pulau Rambai	7 buah	9 buah
6	Pualu Birandang	6 buah	18 buah
7	Koto Perambahan	4 buah	11 buah
8	Deli Makmur	3 buah	4 buah
9	Sungai putih	3 buah	5 buah
Jumlah		31 buah	59 buah

Sumber: Kantor Camat Kampar Timur, Data Desember 2008

Pembangunan sarana ibadah ini pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang mendapat bantuan dari lembaga pemerintahan seperti Departemen Agama dan Pemerintahan Kabupaten ataupun Pemerintahan Propinsi.

Kuatnya agama di daerah ini, terbukti banyaknya sekolah-sekolah agama, seperti MDA, MTS, serta ada dua pesantren yang santrinya bukan saja bersal dari daerah setempat, bahkan banyak yang bersal dari luar Kecamatan Kampar Timur,

bahkan ada dari beberapa orang yang berasal dari propinsi Riau⁷. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah lembaga pendidikan agama di Kecamatan Kampar.

TABEL IV
KOMPOSISI JUMLAH SARANA PENDIDIKAN AGAMA
DI KECAMATAN KAMPAR TIMUR

No.	Desa	MDA	MTs	PON-PES
1	Kampar	2 buah	-	1 buah
2	Sei Tarap	1 buah	1 buah	-
3	Tanjung Bungo	2 buah	-	-
4	Desa Sawah Baru	-	-	-
5	Pulau Rambai	4 buah	1 buah	-
6	Pualu Birandang	3 buah	-	1 buah
7	Koto Perambahan	3 buah	-	-
8	Deli Makmur	1 buah	-	-
9	Sungai putih	1 buah	-	-
Jumlah		17 buah	2 buah	2 buah

Sumber: Kantor Camat Kampar Timur, Data Desember
2008

D. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu Bangsa dan merupakan saran untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia.

⁷ Bakhtiar Daud; Pimpinan Pondok Pesantren Islamic Centre al-Hidayah Kampar, wawancara, 21 Februari 2007.

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan faktor yang sangat penting ditingkatkan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, tidak akan terwujud bila sumber daya manusianya tidak disiapkan dengan baik. Di sisi lain pendidikan merupakan sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang profesional. Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik, setiap orang akan dapat secara langsung memperbaiki tingkat kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin cepat dapat diwujudkan.

Sarana pendidikan yang tersedia di daerah ini, mulai dari TK sampai tingkat menengah, baik yang berstatus negeri, maupun yang dikelola oleh swasta. Tabel berikut ini dapat dilihat jumlah sasaran pendidikan, murid dan guru yang terdapat di daerah ini :

TABEL V**KOMPOSISI JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN KAMPAR
TIMUR**

No.	Desa	TK	SD	MDA	SLTP	MTs	SLTA	MA
1	Kampar	2	1	2	1	1	1	1
2	Sei Tarap	1	1	1	-	-	-	-
3	Tanjung Bungo	1	1	1	1	1	1	-
4	Sawah Baru	-	-	-	-	-	-	-
5	Pulau Rambai	2	4	3	1	1	1	-
6	Pualu Birandang	2	4	3	1	-	1	1
7	Koto Perambahan	1	2	3		1		
8	Deli Makmur	1	1	1				
9	Sungai putih		1	1				
Jumlah		12	14	15	4	5	2	1

Sumber: Kantor Camat Kampar Timur, Data Februari Tahun 2006.

Sosial Budaya dan Adat Istiadat

1. Sosial Budaya

Masyarakat kecamatan Kampar adalah masyarakat yang menisbahkan garis keturunannya kepada ibu (Matrilinial), artinya budaya yang berlaku dalam masyarakat adalah budaya Minangkabau, seperti dapat terlihat dalam sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan.

Terdapatnya persamaan kekerabatan antara daerah ini dengan Minangkabau, tidak terlepas dari kuatnya pengaruh Kerajaan Pagaruyung pada masa lampau, di mana daerah ini termasuk bagian dari daerah kerajaan dari Pagaruyung. Dari sinilah asal mula berkembangnya tata nilai adat Minangkabau, yang berkembang terus sehingga berdirinya Propinsi Riau⁸

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi dipraktekkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga, orang harus mengikuti aturan agama dan juga aturan adat, yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Dari sisi prinsip-prinsip material, peranan Islam sangat dominan, karena hampir semua sisi-sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan nilai ke-Islaman, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut (Kecamatan Kampar Timur).

Dewasa ini, terutama di era kemajuan sian dan teknologi, ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modern seperti

⁸ Akhyar Hamzah, *Laporan Penelitian; Tradisionalisme Dan Modernisme Dalam Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim Kab. Kampar*, (Pekanbaru : Lembaga Penelitian dan Pengembangan IAIN SUSQA Pekanbaru, 2002), h. 28.

teknologi komunikasi dan transportasi, membawa perubahan pula kepada pandangan hidup sebagian masyarakat di daerah ini. Dapat disaksikan pola hidup yang konsumtif telah mulai menggejala di dalam kehidupan masyarakat di daerah ini.

2. Adat Istiadat

Di samping menganut agama Islam, Masyarakat Kecamatan Kampar Timur juga terikat oleh aturan-aturan adat yang mereka warisi dari pemimpin adat masing-masing. Adat itu merupakan kebiasaan yang berlaku dalam hidup sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat mereka yang tidak boleh dilanggar sedikitpun.

Mengenai adat istiadat yang berlaku di Kecamatan Kampar Timur, yaitu pola adat tersendiri yang disebut dengan adat Andiko 44 yang berpusat di Muara Takus. Kawasan adat Andiko 44 ini bersuku kepada ibu (matrilinial) yang berada di sepanjang sungai Kampar, termasuk Kuantan, / Indra Giri sekarang Kab. Kampar, sebagian Sumbar, Rokan (Langgam) Pekanbaru, Kuansing dan Indra Giri Hulu⁹.

Di daerah ini juga terdapat suku-suku yang macam-macam, yang masing-masing suku dikepalai oleh seorang penghulu adat yang sifatnya turun-temurun, di antara suku tersebut adalah:

- a. Suku Piliang, Penghulunya adalah Datuok Bosou

⁹ Ali Akbar Dt. Pangeran, *Islam dan Adat Andiko 44 Melayu Riau*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), h.47.

- b. Suku Pitopang, Penghulunya adalah Datuok Pado Sati
- c. Suku Melayu, Penghulunya adalah Datuok Tiawan
- d. Suku Kampai, Penghulunya adalah Datuok Duko dan Datuok Mogek
- e. Suku Domo, Penghulunya adalah Datuok Temenggung dan Datuok Bijo Anso
- f. Suku Bendang, Penghulunya adalah Datuok Somok Dirajo dan Datuok Mangkuoto Dirajo

Kepala suku tersebut bertanggung jawab menangani untuk menyelesaikan perjanjian-perjanjian, perselisihan-perselisihan dan permasalahan adat lainnya, yang terjadi antar suku bersangkutan, misalnya dalam acara tunangan, thalak, ruju', perkelahan antar anak kemenakan, dan lain sebagainya.

Dalam hal penyelesaian persoalan dan perkara yang terjadi tersebut, prinsip musyawarah untuk mufakat tetap dikedepankan, mereka tidak dibenarkan seenaknya saja antara satu suku dengan suku lainnya, sehingga jarang terjadinya perkelahan/ perang antar suku.

Apapun permasalahan yang terjadi dan apapun yang hendak diperbuat, harus diberitahukan kepada penghulu adat dari suku bersangkutan. Kalau tidak demikian halnya, maka orang tersebut disingkirkan dari daerah kekuasaan ninik mamak bersangkutan, sehingga menyebabkan masyarakat yang lain tidak akan menghargai orang itu.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Kata waris menurut bahasa arab "*waratsa*" merupakan mashdar dari dan dikatakan; "*si-fulan mewarisi* kepada kerabatnya, dan mewariskan kepada ayah-ayahnya". Kata dari *waratsa* ini telah menjadi dalam bahasa Indonesia. Istilah lain dari kata *waratsa* adalah kata "*faraidh*" yang berarti kadar/ketentuan.¹ Selain itu terdapat pula kata "*tirkah*" yang berarti barang-barang peninggalan². ketiga istilah diatas dalam tulisan ini diartikan sama.

Firman Allah swt dalam surat al-Qashash ayat 58

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ
بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

Artinya: "*Dan kami adalah orang-orang yang mewarisi*"³.

Arti Mirats (*waris*) menurut lughat ialah pindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada harta, meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya.⁴ Secara terminologi, "*mirats*" berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli

¹ Said al-Bakri Muhammad Syata, *I'anatu at-Thalibin*, (Kairo: Mustfa al-Babi al-Halabi,tt), Cetakan Kedua, h. 224

² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), Cetakan Kedua h. 1080.

³ Depag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), cet. Pertama, h. 619.

⁴ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam syari'at Islam*, Ali Bahasa Samhuji Yahya, (Bandung: Ponegoro, 1995), Cetakan kedua, h. 40.

warisnya. Sedangkan "*mirats*" menurut syari'ah adalah memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut. Jadi, hukum waris adalah salah satu hukum kekeluargaan Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa ahli waris yang ditinggalkannya, ahli waris itu disebut dengan waratsah, yakni ahli waris dan wali. Didalam bahasa arab, kewarisan ini dikenal dengan istilah mirats.⁵

Definisi diatas jelas menerangkan ketiga unsur dalam kewarisan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kejelasan dari definisi tersebut dapat diketahui dari kata:

1. Mayyit, orang yang meninggal dunia sebagai pewaris, bukan orang yang masih hidup seperti kewarisan adat.
2. Warasati, ahli waris yang masih hidup ketika pewarisnya meninggal dunia, sebagai ahli warisnya bukan ahli waris yang sudah meninggal dunia.
3. Al-Milkiyah, pemilikan (*pewaris*) berupa harta benda tidak bergerak atau hak syara'.

Istilah pewaris dalam bahasa Indonesia sering diindentikkan dengan istilah faraidh, karena kedua istilah tersebut sama-sama membicarakan harta peninggalan si Mayyit. Namun kalau dilihat kembali definisi faraidh, akan terlihat perbedaannya. Secara definitive, yaitu dikatakan faraidh adalah "Bagian yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'".⁶

Dengan demikian jelaslah bahwa istilah faraidh bukan satu kesatuan istilah yang sama di dalam membicarakan sesuatu, tetapi keduanya berpautan dalam masalah harta

⁵ A. Rahman, *I Doi Syari'ah II Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1996), Cetakan Pertama, h. 98

⁶ Fathur Rahman, *Ilmu waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), Cetakan Kedua, h. 32

peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Istilah waris mencakup segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit kepada ahli warisnya, berupa harta, benda atau hak. Sedangkan faraidh berperan menentukan bagian-bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris dari warisan si mayit.

Jadi secara operasional, faraidh membicarakan tentang masalah pembagian harta bawaan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan warisan mempunyai jangkauan yang lebih jauh daripada sekedar menentukan erat dengan hal waris-mewari, maka harus ada tida unsur dalam kewarisan sebagai penagak adanya wari mewarisi di antara pewaris dan ahli waris.

Ketiga unsur tersebut adalah:

1. Harta warisan yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayyit (*pewaris*) kepada ahli waris setelah diambil untuk membiayai pengurusan jenazah, pembayaran hutang-hutangnya dan pelaksanaan wasiatnya. Harta benda ini milik orang yang meninggal dunia dan secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya setelah pewarisnya meninggal dunia.
2. Pewaris yaitu orang yang akan memberikan harta warisan kepada kerabat-kerabatnya yang termasuk ahli warisnya, sebab kerabat itu ada yang termasuk ahli waris dan ada yang bukan ahli waris.
3. Ahli waris yaitu orang yang akan menerima harta warisan dari pewarisnya, bila pewarisnya meninggal dunia.⁷

Menurut istilah fiqh, para ulama memberikan beberapa batasan tentang faraidh. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan segala yang ditinggalkan

⁷ *Ibid*, h. 36

oleh si mati, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan dan non kebendaan.⁸ Ulama lain seperti Hanafiyah memberikan batasan tentang faraidh, yaitu suatu ilmu untuk mengetahui orang yang menerima warisan, orang yang tidak menerima warisan, ketentuan bagian yang diterima oleh para ahli waris dan tata cara pelaksanaan pembagian warisan.⁹

Menurut Fatchur Rahman, *tirkah* ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk di pusakai para ahli waris. Yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia ialah benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, hak-hak kebendaan, hak-hak non kebendaan maupun benda-benda yang masih terkait dengan hak orang lain.¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa Hukum Kewarisan ialah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹¹

Wirjono Prodjodikoro, mantan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan bahwa hukum waris ialah Hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan berpindah kepada orang lain yang masih hidup.¹²

⁸ Fatchur Rahman, *op. cit.*, h. 38.

⁹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1972), Cetakan Pertama h. 18.

¹⁰ Fatchur Rahman, *op cit.*, h. 37.

¹¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), Cetakan Pertama h. 155.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa dalam proses perpindahan harta atau hak tersebut harus ada seseorang yang akan menerima sebagai ahli waris, harus ada pewaris dan ada pula harta yang akan diwariskan. Ketiga komponen tersebut merupakan unsur-unsur kewarisan. Berdasarkan batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang penindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris setelah ia meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki, taqdiri maupun berdasarkan putusan Pengadilan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan bebas dari penghalang kewarisan. Adapun harta warisan adalah harta pewaris yang siap untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak. Kajian ini dapat ditelusuri dalam Nash al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW sebagai landasan pokok Hukum Kewarisan Islam.

Pada uraian diatas telah disebutkan bahwa seorang ahli waris dapat menerima harta warisan bila pewarisnya telah meninggal dunia dan ahli waris tersebut masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Bila ahli waris telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal, atau meninggal secara bersamaan, maka ahli waris tersebut tidak dapat mewarisi harta pewarisnya, karena ia telah meninggal dunia. Dan orang yang meninggal secara bersamaan tidak akan saling mewarisi.

Apabila rukun-rukun dan syarat-syarat mewarisi sudah terpenuhi dan ia tidak termasuk ahli waris yang mahjub(*terhalang*), ia tidak dapat warisan, atau bagiannya berkurang karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit.

¹² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), Cetakan Pertama h. 104.

2. Surat an-nisa' ayat 11 yang berbunyi :

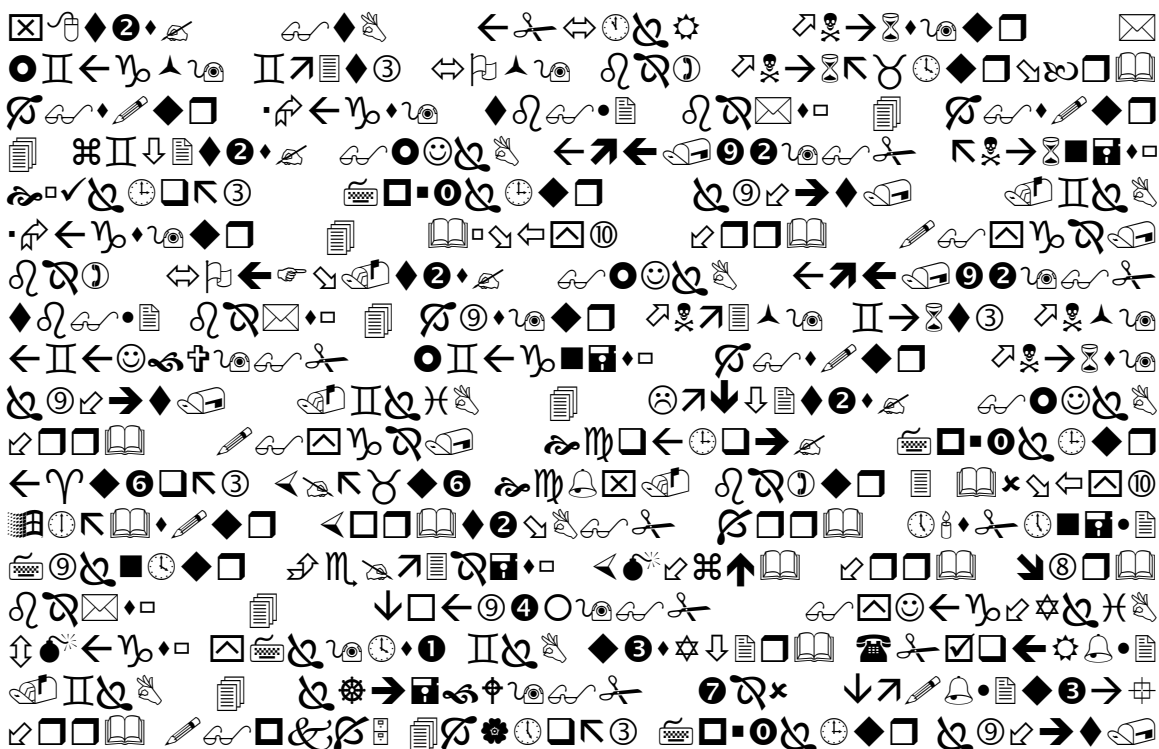
[illegible]

¹³ Depag R.I., *Op,Cit.*, h. 116.



Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggalkan itu tidak mempunyai anak dan ia mewarisi oleh ibu bapak saja maka ibunya mendapat $\frac{1}{3}$, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat $\frac{1}{6}$. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengerti siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah keterangan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.¹⁴

3. Surat an-nisa’ ayat 12 yang berbunyi :



¹⁴ Ibid.



Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 harta itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai Syari’at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun.”¹⁵

Selain tiga ayat yang telah disebutkan diatas, dasar adanya Hukum kewarisan Islam juga terdapat dalam ayat 33 dan ayat 176 pada surat yang sama. Adapun Hadits Nabi SAW yang mengatur tentang Hukum kewarisan Islam diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلعم قال الجق الفرائض باهلها فمابقى

¹⁵ *Ibid.*

Artinya : “Berikanlah faraidh (bagian) yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.”¹⁶

2. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah.

عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلعم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر

Artinya : “Seorang Muslim tidak menerima warisan dari yang bukan Muslim dan yang bukan Muslim tidak menerima warisan dari orang Muslim.”¹⁷

3. Hadits dari Huzail bin Surahbil menurut riwayat Abu Daud, Bukhari, Turmudzi dan Ibnu Majah.

عن هزيل بن سرحبيل قال سئل ابو موسى عن ابنة وابنة ابن واخت النصف وللأخت النصف وات ابن مسعود فسيتا بعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقض فيهما بما قص

Artinya : “Dari Huzail bin Surahbil berkata ia : Abu Musa ditanya tentang kewarisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan. Abu Musa berkata : Untuk anak perempuan 1/2, untuk saudara perempuan 1/2, datanglah kepada Ibnu Mas’ud tentu ia akan mengatakan seperti itu pula. Kemudian ditanyakan kembali kepada Ibnu Mas’ud dan menjawab : Saya menetapkan atas dasar apa yang ditetapkan Nabi, yaitu untuk anak perempuan 1/2, untuk cucu perempuan 1/6 untuk melengkapi 2/3, dan sisanya adalah untuk saudara perempuan.”¹⁸

4. Hadits riwayat Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad.

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami’al-Shahih lil Bukhari Juz 2*, (Cairo : Maktabah Salafiyah, 1981), Cetakan ke-1, h. 286.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, h. 6.

أ

ة يابنين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن ربي
ع فقال معك يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما ما
لا ولا تتكحان الاولهما مال قال يقى الله في ذلك فنزلت اية الميراث فبعث رسول الله
لعم الى عمهما فقال اعط ابنتى سعد الثلثين واعط اصهما الثمن ومابقى فهو لك

Artinya : “Dari Jabir Ibnu Abdullah berkata : Janda Sa’ad bin Rabi’ datang kepada Nabi SAW bersama dua orang anak perempuannya. Ia berkata : Ya Rasul ini dua anak perempuan Sa’ad yang telah gugur dalam peperangan bersama kamu di Uhud, paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberi apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta. Nabi SAW bersabda : Allah akan menetapkan Hukum dalam kejadian itu. Sesudah itu turunlah ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi SAW memanggil paman dari kedua anak perempuan tersebut dan berkata : Berikan 2/3 untuk dua jandanya, dan sisanya adalah untukmu.¹⁹

Selain dari dua sumber diatas, masih terdapat lagi cara lain yang disebut Ijtihad (ra’yi). Pemakaian Ijtihad ini dimungkinkan bila dalam suatu kasus kewarisan tidak terdapat Nash yang menjelaskannya. Pada dasarnya Nash Al-Qur’an dan Hadits yang mengatur tentang Hukum kewarisan sudah terperinci. Namun demikian, masih banyak hal-hal yang berhubungan dengan kewarisan yang belum jelas. Oleh karena itu, para Mujtahid berusaha secara maksimal untuk menentukan aturan kewarisan yang belum jelas tersebut.

Hasil Ijtihad yang telah dirintis oleh para Mujtahid terdahulu pada dasarnya terdapat dua pola pemikiran, yaitu pola yang dikembangkan Ahli Sunnah dan yang dikembangkan oleh Syi’ah. Perbedaan yang mendasar antara keduanya ialah pemahaman terhadap kedudukan perempuan dalam Hukum kewarisan, sehingga menimbulkan perbedaan yang nyata tentang susunan ahli waris dan tata cara pelaksanaannya. Kelompok Ahli Sunnah terpecah lagi menjadi kelompok Jumhur (mayoritas) dan

¹⁹ Abu Daud Sulaiman bin Asy’at al-Sijistani, *Sunan Abi Daud Juz 3*, (Kairo : Mustafa al-Babi, 1952), Cetetakan ke-1, h. 305.

kelompok Zahiri. Kedua kelompok ini berbeda dalam memahami Nash, sehingga berbeda pula terhadap garis Hukum kewarisan yang mereka tetapkan. Bahkan dikalangan Jumhur sendiri masih terdapat pula beberapa perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut tidak terlalu prinsip.²⁰

A. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan sub sistem dari keseluruhan Hukum Islam yang khususnya mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Suatu sistem adalah sekumpulan asas-asas yang terpadu yang merupakan landasan, diatasmana dibangun tertib hukum. Asas-asas ini diperoleh melalui konstruksi yuridis, yaitu dengan menganalisis atau mengola data-data yang sifatnya nyata (konkrit) untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum (kolektif) atau abstrak. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan dengan satu sama lain dan karena ada ikatan oleh asas-asas Hukum, maka Hukumpun merupakan satu sistem.²¹

Sebagian dikemukakan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan suatu bagian dari hukum Islam, yang khusus mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Sebagai hukum kewarisan Islam tentunya memiliki keistimewaan-keistimewaan dari hukum kewarisan yang lain, yang dapat digali dari sumber-sumber aslinya. Keistimewaan tersebut tercermin dalam lima prinsip/asas dasar, yaitu :

²⁰ Hajar M., *Fiqh Mawaris*, (Pekanbaru : IAN Susqa, 1989), Cetakan Pertama h. 8.

²¹ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1995), Cetakan Pertama h. 28.

1. Asas Ijbari

Asas Ijbari, secara etimologis kata “*Ijbari*” mengandung arti “paksaan” (*compolsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. hukum kewarisan mempunyai asas Ijbari, berarti bahwa peralihan harta dari orang yang telah mati kepada ahli waris berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya otoritas pewaris atau ahli waris. Ahli waris terpaksa menerima kenyataan peralihan harta kepadanya sesuai dengan saham yang telah ditentukan.²² Pewaris (sebelum meninggal dunia) tidak dapat menolak peralihan hartanya kepada ahli waris, kecuali dalam batas tertentu yang telah ditetapkan oleh hadits. Asas ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu peralihan harta, jumlah harta yang berpindah, dan orang-orang yang akan menerima harta. Aspek peralihan harta dapat diperhatikan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 7. Dalam hukum waris berarti “terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut”. Dengan perkataan lain, adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Adanya asas Ijbari terlihat dari tiga aspek, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.²³

2. Asas Bilateral

Asas Bilateral, yaitu suatu sistem kekerabatan yang menetapkan hubungan darah antara sesama manusia melalui ayah dan ibu (keatas) dan kepada anak (laki-laki atau

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo : Dar al-Fikri al-Arabi, tt), Cetakan h. 195-196

²³ Suhra Wardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris, (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet. Pertama, h. 36.

perempuan) dan seterusnya kebawah. Kebilateralan dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisannya dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak kerabat laki-laki dan perempuan.²⁴ Asas bilateral ini didasarkan pada ayat 7, 11, 12, dan 176 surat an-Nisa'. Dari ayat 7, yang menjelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan pihak ibu. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayah dan pihak ibu. Pada ayat 11 ditegaskan pula bahwa anak perempuan berhak menerima harta dari orang tua sebagaimana yang diperoleh anak laki-laki, dengan bandingan satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Ayah juga berhak mewarisi anaknya yang laki-laki dan yang perempuan.

Ayat 12 menjelaskan bahwa bila pewaris seorang laki-laki yang punah, saudaranya yang laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan. Demikian pula jika pewaris seorang perempuan yang punah, saudaranya yang laki-laki dan yang perempuan berhak mewarisi. Sedangkan pada ayat 176 dinyatakan pula bahwa seseorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sementara ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya itu berhak mewarisi. Demikian pula bila seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, saudaranya yang laki-laki berhak mendapat harta warisan.

Kewarisan dari dua pihak garis kekerabatan berlaku pula untuk kerabat garis kesamping, yakni saudara laki-laki dan perempuan saling mewarisi dalam keadaan "akalah". Apabila dilihat dari keseluruhan ayat-ayat kewarisan hanya dua ayat yang menggambarkan tentang adanya peristiwa kalalah, yaitu surah an-Nisa' ayat 12 dan 176, yaitu masing-masing ayat menggambarkan adanya saudara seorang atau lebih dalam hal

²⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 19.

seorang meninggal dunia berada pada posisi kalalah. Ulama telah berijma' sesungguhnya kalalah itu ialah seorang yang mati tidak meninggalkan anak (keturunan) dan orang tua.²⁵ Saudara dalam ayat 12 maksudnya adalah saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan saudara-saudara dalam ayat 176 adalah saudara sekandung seayah.

Kewarisan kakek (keatas) dapat ditetapkan dari kata "*abun*" dalam al-Qur'an yang berlaku untuk kakek secara umum. Begitu pula kewarisan nenek yang dikembangkan dari kata-kata "*ummun*" dalam al-Qur'an.

Asas bilateral ini juga berlaku terhadap kewarisan cucu (kebawah) yang dikembangkan dari kewarisan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja dalam pemahamannya terdapat perbedaan yang prinsipil antara kelompok ahli Sunnah dan kelompok Syi'ah.

3. Asas Individual

Asas individual, yaitu harta warisan mesti dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Asas ini berkaitan langsung dengan asas Ijbari, bahwa bila terbuka harta warisan mesti langsung diadakan pembagian kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat pada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

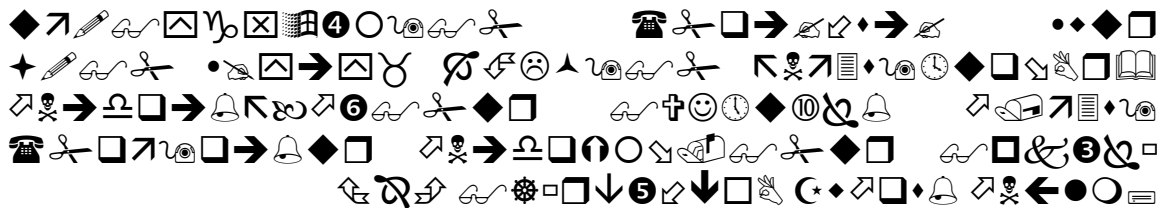
Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqh disebut "*ahliyatul al-wujub*". Sifat Individual dalam kewarisan Islam dapat dikaji

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar-al-Qalam, 1979), cet, Pertama, h. 135.

dalam aturan-aturan al-Qur'an. Diantaranya ayat 7 surat an-Nisa' diambil kesimpulan bahwa jumlah bagian untuk ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya, jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Pembagian secara individual ini merupakan ketentuan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam, yaitu setiap ahli waris yang dipandang cakap bertindak atas harta miliknya, atau dalam istilah ushul fiqh dikenal dengan istilah "*ahliyat al-ada*".²⁶

Bagi ahli waris yang belum memenuhi kecakapan bertindak, maka mereka berada dibawah pengampuan walinya dan perbelanjaannya diambil dari harta waris tersebut. Hal ini didasarkan pada ayat 5 surat an-Nisa' yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada orang *safih*, yakni orang yang belum dewasa.

Firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 5 yang berbunyi :



Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".²⁷

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Op,Cit* h. 332.

²⁷ Depag R.I., *Op,Cit.*, h. 115.

Dalam ayat ini yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada orang safih, yakni orang belum dewasa,²⁸ dan juga bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan secara orang tua ataupun kerabatnya, karena secara prinsip umum hukum kewarisan Islam baik dari segi keadaan, sifat, maupun dari segi yang lainnya, laki-laki dan perempuan mendapat harta ataupun saham tertentu dalam arti kata ada perbedaan antara keduanya.²⁹

Tetapi perlu diketahui bahwa setiap individu terkadang beruba harta atau harta yang mereka terima karena dipengaruhi oleh faktor kehadiran ahli waris lain. Itulah sebabnya sehingga 12 kelompok ahli waris yang disebutkan dalam al-Qur'an, enam diantaranya adalah perempuan, yakni isteri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu. Sedangkan selebihnya adalah anak laki-laki, yakni suami, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, seayah dan seibu.

Oleh karena itu menurut Hazairin : “asas individual adalah sistem kewarisan dimana ahli waris-ahli waris berhak memperseorangkan harta peninggalan itu dengan cara membagi-bagikan pemilikan harta itu diantara mereka.” Dari pendapat tersebut bisa diartikan bahwa seluruh keluarga, baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dan berhak mendapat saham atau harta yang tertentu secara perorangan apabila telah wafat salah seorang anggota keluarga tersebut. Dan kemudian menurut Amir Syarifuddin : pembagian secara individual seperti itu adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim. Hal serupa juga diisyaratkan oleh Hazairin

²⁸ Muhammad bin Ahmad al-Qurtuby, *al-Jami'u li Ahkami al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Katib al-Ilmiyah, 1993), Cetakan Ketiga h. 20.

²⁹ Dian Kirul Uman, *Fiqhu Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cetakan Keempat h. 23.

sehingga kewarisan dalam al-Qur'an adalah termasuk jenis yang individual bilateral. Dan hal tersebut juga diakui oleh Noel J. Coulson dengan memberi tekanan bahwa perempuan mendapat penghargaan karena kedudukannya ditingkatkan menjadi lebih baik. Demikian juga dengan laki-laki seibu karena sebelumnya, yaitu zaman jahiliyah, ia tidak mendapat pusaka. Meskipun setiap ahli waris berhak mendapat pusaka secara individual.

Akan tetapi menurut al-Qur'an dalam surah an-Nisa' ayat 5 menjelaskan bahwa janganlah kamu serahkan harta milik kepada ahli waris yang belum sempurna akalnya, karena ditakutkan disalah gunakan atau belum tahu kemana harta tersebut dibawanya.

Pada prinsipnya, apabila wali yang menjaga harta anak yang tidak cakap, maka wali tidak boleh menjadikan harta tersebut sebagai kewarisan kolektif. Kewarisan kolektif adalah menyalahi ketentuan karena dapat menghamburkan hak milik anak yang tidak cakap.

Dan bahkan Tuhan mengutuk orang yang menggunakan harta anak yatim, jadi kewarisan individual pada dasarnya sangat relevan dengan kebutuhan semua pihak.

Dalam hukum kewarisan sudah diatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan, dan sudah menjadi ketentuan yang dinyatakan dalam undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.

4. Asas Keadilan

Asas Keadilan, yaitu keadilan antara hak dan kewajiban serta keadilan antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang seimbang dengan kewajiban yang

dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka saling berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, seperti yang diungkapkan dalam ayat 7 surat an-Nisa' dan bagian yang diterimanya berimbang dengan perbedaan tanggung-jawab masing-masing terhadap keluarga.

Kata “*adlu*” diulang sebanyak 28 kali dalam al-Qur'an. Ada yang diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan ada juga dalam bentuk kalimat berita. Kata tersebut diturunkan dalam konteks dan arah yang berbeda, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda pula sejalan dengan hukum kewarisan Islam, *adlu* (keadilan) dapat diartikan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.³⁰

Asas keadilan ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dan antara yang diperoleh seseorang. Misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, bahwa harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga dan mencukupi keperluan anak isterinya.

5. Asas Kematian

Asas ini menyatakan bahwa peralihan harta dari seseorang kepada orang lain atas nama kewarisan berlaku sesudah matinya pemilik harta. Asas ini berarti bahwa harta

³⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 23.

seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama pemilik harta masih hidup dan segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (*ab intestato*) dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup (kewarisan *testamen*).³¹ Memang di dalam ketentuan hukum Islam dikenal juga istilah wasiat, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.

B. Ahli Waris dan Pembagiannya

Seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris apabila ia mempunyai sebab-sebab yang memasukkannya dalam kelompok ahli waris. Apabila ia tidak mempunyai salah satu sebab menjadi ahli waris, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris. Penggolongan seorang sebagai ahli waris dapat melalui perkawinan, kekeluargaan atau keturunan, memerdekakan hamba sahaya (*wala'ul 'ataqah*)³² dan satu agama antara pewaris dan ahli waris.

Secara umum para ulama menghubungkan ahli waris itu, didasarkan pada dua hubungan, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dalam hubungan darah melalui garis laki-laki dan melalui garis perempuan.

Golongan ahli waris laki-laki *Nasabiyah* (hubungan darah)

2. Anak laki-laki
3. Cucu laki-laki garis laki-laki

³¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata.*, (Hakarta : Praty Paramita, 1989), h. 78

³² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Cetakan Kedua, h. 386-387

4. Ayah
5. Kakek (dari garis ayah)
6. Saudara laki-laki sekandung
7. Saudara laki-laki seayah
8. Saudara laki-laki seibu
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung
11. Paman, saudara laki-laki ayah seayah
12. Anak laki-laki paman sekandung
13. Anak laki-laki paman seayah

Golongan ahli waris perempuan *Nasabiyah* (hubungan darah)

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan garis laki-laki
3. Ibu
4. Nenek dari garis ibu
5. Nenek dari garis ayah
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu

Dari ahli waris *nasabiyah* tersebut, jika dikelompokkan berdasarkan menurut tingkatan kekerabatan sebagai berikut:

1 *Furu' al-Waris*, yaitu ahli waris anak keturunan si mayit, atau disebut kelompok cabang (*al-Bunuwah*). Kelompok inilah yang terdekat, dan mereka yang harus didahulukan untuk menerima warisan. Ahli waris kelompok ini adalah:

- 1 Anak perempuan
- 2 Cucu perempuan garis laki-laki
- 3 Anak laki-laki
- 4 Cucu laki-laki garis laki-laki

5 *Ushul al-Warisi*, yaitu ahli waris leluhur si mayit. Jadi kedudukannya berada setelah kelompok *Furu' al-waris*. Kelompok ini adalah:

1. Bapak
2. Ibu
3. Kakek garis bapak
4. Nenek garis ibu
5. Nenek garis ayah.

2. *al-Hawasyi*, yaitu ahli waris kelompok saudara, termasuk di dalamnya paman dan keturunannya. Seluruh ada 12 orang yaitu:

1. Saudara perempuan sekandung
2. Saudara perempuan seayah
3. Saudara perempuan seibu
4. Saudara laki-laki sekandung
5. Saudara laki-laki seayah
6. Saudara laki-laki seibu
7. Anak saudara laki-laki sekandung

8. Anak saudara laki-laki seayah
9. Paman sekandung paman seayah
10. Anak paman sekandung anak paman seayah.³³

Golongan Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* disebabkan adanya hubungan dengan si-pewaris karena sebab-sebab tertentu, yaitu *pertama* hubungan perkawinan dalam hubungan ini hanya ada dua; duda dan janda.³⁴ *Kedua*; adanya sebab memerdekakan hamba sahaya. Hubungan perkawinan ini harus dibuktikan dengan perkawinan yang sah, sedangkan untuk memerdekakan hamba sahaya juga dibuktikan dengan hukum yang berlaku.

Setelah mengetahui keberadaan kedua golongan *nasabiyah* dan *sababiyah* maka kedua golongan *nasabiyah* dan *sababiyah* yang menjadi penentu dalam pembagian garis penghubung jarak dekat. Maka, dilanjutkan dengan langkah penyusunan garis keutamaan ahli waris, atau yang dianggap menjadikan tolak ukur akan menyusul datangnya kerabat selanjutnya.

Namun, sebelum melangkah lebih jauh, siap diantara mereka yang akan menjadi ahli waris inti. Menurut ayat mawaris an-Nisa' ayat 11 dan 12, mereka ialah; suami, isteri, ibu, ayah, anak perempuan dan anak laki-laki. Demikian tersebut, sah untuk disebut dengan ahli waris inti.³⁵ Artinya karena dalam kenyataan bahwa kemungkinan yang mutlak mereka itu tentu menerima hak kewarisannya. Sementara ahli-ahli waris diluar mereka justru tertutup sama sekali, selagi masih ada anak, ayah, dan ibu, sehingga mereka tidak bisa menikmati kewarisan mereka menerima bagian harta tinggalan.

³³ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawarits*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cetakan Kedua, h. 52

³⁴ Ahmad Rafiq, *op cit*, h. 384

³⁵ *Ibid.*

Dilihat dari bagian yang diterima, berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Ahli waris “*ashab al-Furudh*” yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dan lain-lain.
2. Ahli waris “*ashab al-‘usubah*” yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada “*ashab al-Furudh*”, seperti anak laki-laki, ayah, paman dan lainnya. Ada juga ahli waris yang selain menerima bagian tertentu juga menerima bagian sisa, seperti ayah.
3. Ahli waris “*zawil arham*” yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena dalam ketentuan Nash tidak diberikan bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashab al-furudh* dan *ashab al-‘usubah* tidak ada. Diantara mereka adalah cucu perempuan garis perempuan.

Dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan, ahli waris dapat dibedakan menjadi :

1. Ahli waris “*hajib*”, yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya, ia menutup hak waris ahli waris yang jauh hubungannya. Contohnya anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara perempuan.
2. Ahli waris “*mahjub*” yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya, dan ia terhalang untuk mewarisi.

Tertutupnya mewarisi karena dekat jauhnya hubungan kekerabatan adalah bersifat temporer, artinya bila ahli waris hajib tidak ada, maka ahli waris berikutnya dapat menerima warisan. Berbeda dengan penghalang mewarisi yang disebut dengan “*mawani’ al-irs*” (penghalang mewarisi yang bersifat permanen).

Secara umum Hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam pembagian kepada ahli waris. Pertama, ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti melalui Nash. Ahli waris jenis ini biasa disebut *ashab al-furudh* atau *dzawil furudh* (*dzul furudh*). Kedua, ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan secara pasti oleh Nash, yang biasa disebut *ashabah*.

Ahli waris yang termasuk dalam *ashab al-furudh* ada dua belas orang, delapan orang terdiri atas perempuan dan empat orang terdiri atas ahli waris laki-laki. Delapan orang ahli waris dari pihak perempuan mereka adalah :

a. Isteri

Ketentuan bagian isteri adalah $\frac{1}{4}$ baik seorang atau lebih dengan syarat yang meninggal itu tidak mempunyai anak. Jika yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu maka isteri mendapat $\frac{1}{8}$, ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 12.

b. Anak perempuan

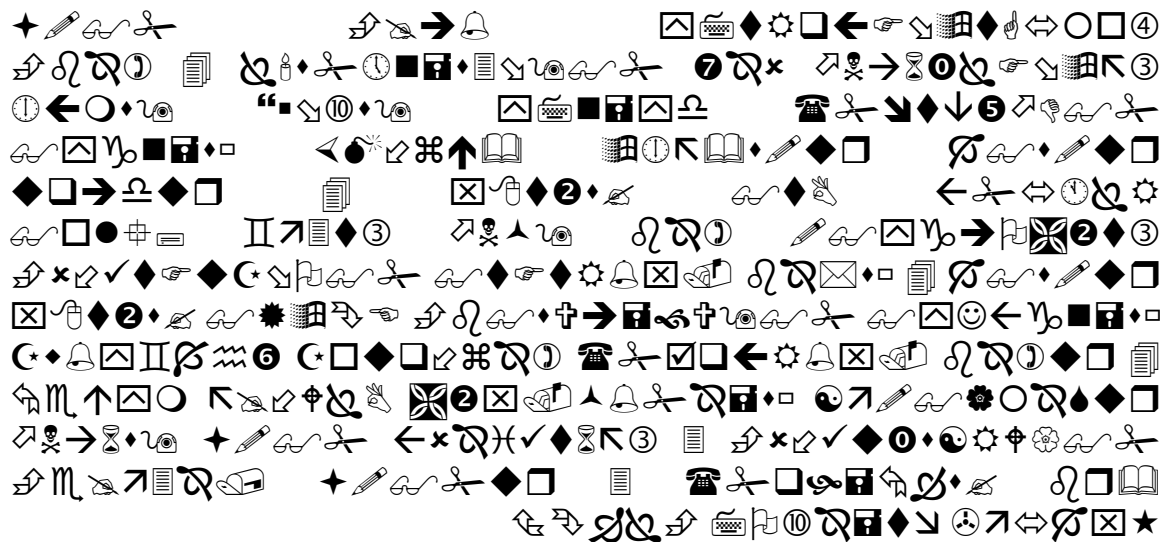
Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta warisan bila yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak laki-laki lagi pula perempuan itu sendiri. Bila ia lebih dari seorang maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta warisan tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 11.

c. Cucu perempuan

Cucu perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan dengan syarat tidak ada anak laki-laki maupun anak perempuan dan tidak ada cucu laki-laki. Bila cucu perempuan itu dua orang atau lebih maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$. Ketentuan seperti ini diqiyaskan kepada anak perempuan.

d. Saudara perempuan sekandung

Saudara perempuan sekandung mendapat $\frac{1}{2}$ jika seorang saja dengan syarat yang meninggal itu tidak ada anak, cucu dan ayah, serta tidak ada ahli waris yang menarik menjadi ashabah kepadanya. Kemudian ia mendapat $\frac{2}{3}$, jika dua orang atau lebih dengan syarat seperti diatas. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 176 yang berbunyi :



Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : Jika seorang meninggal dunia, dan tidak mempunyai anak dan ia mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika saudara perempuan itu tidak mempunyai anak, jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal”.³⁶

e. Saudara perempuan seayah

Ketentuan untuk saudara perempuan seayah pada dasarnya sama dengan ketentuan saudara perempuan sekandung, yaitu mendapat $\frac{1}{2}$ bila ia seorang dan mendapat $\frac{2}{3}$ bila

³⁶ Depag R.I., *Op.Cit.*, h. 153.

mereka dua orang atau lebih. Kemudian saudara perempuan seayah mendapat $\frac{1}{6}$, jika satu orang atau lebih dengan syarat yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu laki-laki atau perempuan dan tidak mempunyai bapak atau kakek dan saudara laki-laki kandung atau seapak.

f. Ibu

Ketentuan ibu adalah sebagai berikut :

1. Mendapat $\frac{1}{6}$ apabila bersama-sama dengan anak atau cucu atau dua orang saudara baik seibu seayah atau seayah ataupun seibu.
2. Mendapat $\frac{1}{3}$ apabila tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki ataupun dua orang (lebih) saudara seperti yang disebut diatas.
3. Mendapat $\frac{1}{3}$ sisa, apabila bersama-sama dengan ayah beserta suami atau isteri.

Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 11.

g. Nenek

Nenek mendapat $\frac{1}{6}$ dengan syarat yang meninggal itu tidak mempunyai ibu.

Adapun ahli waris dari pihak laki-laki ada 4 orang yaitu :

a. Suami

Suami mendapat warisan dari dua alternatif :

1. Mendapat $\frac{1}{2}$ apabila yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu.
2. Mendapat $\frac{1}{4}$ apabila bersama-sama anak atau cucu. Ketentuan ini diatur dalam surat an-Nisa' ayat 12.

b. Ayah

Ketentuan bagian ayah ada tiga macam, yaitu :

1. Mendapat $\frac{1}{6}$ bersama-sama dengan anak laki-laki atau cucu.

2. Mendapat $\frac{1}{6}$ dan *ashabah* apabila ia bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.
3. Menjadi *ahsabah*, apabila tidak ada anak atau cucu. Ketentuan ini didasarkan pada surat an-Nisa' ayat 11.

c. Kakek

Ketentuan bagian kakek sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan ayah, sebab kedudukan kakek adalah sebagai pengganti ayah dikala ayah tidak ada. Kakek mendapat $\frac{1}{6}$ bila yang meninggal itu mempunyai anak dan cucu laki-laki.

4. Saudara laki-laki seibu dan

5. Saudara perempuan seibu.

Masing-masing bagian keduanya ini mendapat $\frac{1}{6}$ bila tidak ada ayah atau kakek dan tidak ada anak atau cucu. Hal ini berdasarkan ketentuan ayat 12 surat an-Nisa'. Kemudian saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan mendapat $\frac{1}{3}$ jika ia dua orang atau lebih ketika tidak ada ayah atau kakek, lagi pula tidak ada anak atau cucu. Ketentuan ini juga dijelaskan dalam ayat 12.

Mengenai ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan secara tegas oleh Nash (*ashabah*) terdapat pula dua kelompok yaitu kelompok *ashabiyah* (lantaran memerdekakan budak) dan *nasabiyah* (hubungan kekerabatan). Pengertian *ashabah* dari segi bahasa ialah keluarga laki-laki dari pihak ayah. Sedangkan menurut istilah ialah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu dalam peninggalan harta warisan, karena itu ia bisa menghabisi harta secara keseluruhan ataupun sisa dari *ashabul furudh*.

Argumentasi kewarisan *ashabah* didasarkan kepada Hadits Nabi saw dari Ibnu Abbas menurut riwayat Bukhari yang berbunyi :

قال الحق الفرائض باهلها .

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi saw, beliau bersabda : Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan sisanya adalah untuk orang laki-laki yang lebih utama.³⁷

Menurut istilah fiqh, para Ulama memberikan beberapa batasan tentang faraidh. Ulama malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah mendefinisikan segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan dan non kebendaan. Ulama lain seperti Hanafiyyah memberikan batasan tentang faraidh, yaitu suatu ilmu untuk mengetahui orang yang menerima warisan, orang yang tidak menerima warisan, ketentuan bagian yang diterima oleh para ahli waris dan tata cara pelaksanaan pembagian warisan.

Menurut Fatchur Rahman, *tirkah* ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari’at untuk dipusakai para ahli waris. Yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia ialah benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, hak-hak kebendaan, hak-hak non kebendaan maupun benda-benda yang masih terkait dengan orang lain.

C. Pengertian Harta Bawaan

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut pasal 35 ayat 2 menjelaskan bahwa harta bawaan yang diperoleh kedua suami dan isteri dibawah penguasaan mereka, selama mereka tidak melakukan perjanjian lain, maksudnya mereka membuat perjanjian atas harta tersebut atau memberikan kuasa atas harta tersebut kepada para pihak tertentu.

³⁷ Zunaidi Ahmad al-Zubadi, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Semarang: Thoha Putra, 1989), Cetakan Kedua, h. 117

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau diperoleh sebagai hadiah dan warisan.

Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat 2 menyatakan : *Harta bawaan masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain*".³⁸

Undang-undang Perkawinan pasal 36 ayat 2 menyatakan, "*mengenai harta bawaan masing-masing suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya*".

Hal yang sama juga disampaikan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 2 menyatakan, "*Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya*".³⁹

Menurut pasal 35 ayat 2 menjelaskan bahwa harta bawaan yang diperoleh kedua suami dan isteri dibawah penguasaan mereka, selama mereka tidak melakukan perjanjian lain, maksudnya mereka membuat perjanjian atas harta tersebut atau memberikan kuasa atas harta tersebut kepada para pihak tertentu.

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau diperoleh sebagai hadiah dan warisan.

Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat 2 menyatakan : *Harta bawaan masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah*

³⁸ Putra Karya Medan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Medan: Redaksi Simuabua Mitra Usaha, 1995), Cetakan Pertama, h. 113

³⁹ *Ibid.*

*atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.*³⁸

Undang-undang Perkawinan pasal 36 ayat 2 menyatakan, “*mengenai harta bawaan masing-masing suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya*”.

Hal yang sama juga disampaikan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 2 menyatakan, “*Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya*”.³⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing suami dan isteri, tidak bisa di ganggu atau di otak-atik oleh pasangannya.

Dari segi bahasa pengertian harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.¹ sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.²

Dalam harta benda, termasuk di dalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.³

³⁸ Putra Karya Medan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Medan: Redaksi Simuabua Mitra Usaha, 1995), Cetakan Pertama, h. 113

³⁹ *Ibid.*

¹. Depdikbad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 1989), cet.2, h 199

². Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 200

³. Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Aditya Bakti, 1999), cet. IV, h.

Harta bawaan atau *harta bujangan* antara suami dan isteri yang didapatkan dari harta warisan, wasiat, penghibahan dan hasil usaha sendiri sebelum terjadinya perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 mengatakan bahwa :

”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Dalam pasal tersebut tersimpul adanya asas, bahwa antara suami isteri terdapat ikatan yang erat sekali, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir, ikatan yang nampak dari luar atau ikatan terhadap / atas dasar benda tertentu yang mempunyai wujud, tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani. Jadi menurut asasnya suami isteri bersatu, baik dalam segi materiil maupun dalam segi spiritual.⁵

Mengenai Harta Benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Hal ini berlainan sekali dengan sistem yang dianut B.W yaitu bahwa dalam satu

4. UUP No. 1 Tahun 1974

5 J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.1, h. 185 – 16

keluarga pada dasarnya hanya ada satu kelompok harta saja yaitu harta persatuan suami isteri. Menurut UU No. 1 / 1974 kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah :

a. Harta bersama

Menurut pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, harta bersama suami isteri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat di bawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama.⁶

Ketentuan tersebut di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga boleh kita simpulkan, bahwa termasuk harta bersama adalah :

- 1) Hasil dan pendapatan suami.
- 2) Hasil dan pendapatan isteri.
- 3) Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya diperoleh sepanjang perkawinan.

Dengan demikian suatu perkawinan, (paling tidak bagi mereka yang tunduk pada Hukum Adat) yang dilangsungkan sesudah berlakunya UUP tidak mungkin mulai dengan suatu harta bersama dengan saldo yang negatif, paling-paling, kalau suami isteri

⁶ Ibid., hlm. 188 - 189

tidak membawa apa-apa dalam perkawinannya, maka harta bersama mulai dengan harta yang berjumlah nihil.⁷

b. Harta pribadi

Harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi suami isteri, menurut pasal 35 ayat 2 UUP terdiri dari :

- 1) Harta bawaan suami isteri yang bersangkutan.
- 2) Harta yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan.

Apa yang dimaksud dengan "harta bawaan", dalam undang-undang maupun dalam penjelasan atas UU RI nomor 1/1974, tentang perkawinan", tidak ada penjelasan lebih lanjut, tetapi mengingat, bahwa apa yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk dalam kelompok harta bersama, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud di sini adalah harta yang dibawa oleh suami isteri. Jadi yang sudah ada pada suami dan atau isteri ke dalam perkawinan.

Adanya pemisahan secara otomatis (demi hukum) antara harta pribadi dengan harta bersama, tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengadakan pencatatan pada saat perkawinan akan dilangsungkan (atau sebelumnya) dapat menimbulkan banyak masalah di kemudian hari dalam segi asal usul harta atau harta-harta tertentu pada waktu pembagian dan pemecahan baik karena perceraian maupun kematian (perceraian). Adalah sangat menguntungkan, kalau di kemudian hari dalam peraturan pelaksanaan diadakan ketentuan yang mewajibkan adanya pencatatan harta bawaan masing-masing suami isteri.

7. Ibid., hlm. 192

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal 35 ayat 2, tetapi kalau kita mengingat pada ketentuan pasal 35 ayat 1, maka ketentuan mengenai harta pribadi hibahan dan warisan, kiranya hanyalah meliputi hibahan atau warisan suami / isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan saja.⁸

Pasal 35 ayat 2 mengandung suatu asas yang berlainan dengan asas yang dianut dalam B.W, yang menyebutkan bahwa yang suami dan atau isteri peroleh sepanjang perkawinan dengan Cuma-Cuma baik hibahan atau warisan masuk ke dalam harta persatuan kecuali jika ada perjanjian lain.

Pasal lain dalam UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur harta bersama yaitu pasal 36 dan 37 yang berbunyi :

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan banyak terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta kekayaan dalam perkawinan.

⁸ Ibid., hlm. 193 - 194

Menurut pasal 85 adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Tetapi dalam pasal 86 ditegaskan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

Dalam harta bersama, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974. Mengenai harta bersama lebih lanjut diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97.

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Kajian terhadap harta ini bila dihubungkan dengan masyarakat hukum adat di Indonesia, maka dapat pula di bagi sesuai menurut aspek tinjauannya, yaitu :

1. Ditinjau dari segi wujud harta, maka harta dapat dibagi kepada dua, tanah dan bukan tanah. Tanah disini mencakup segala sesuatu yang tumbuh diatasnya, yang tersimpan didalamnya, dan segala sesuatu yang berada diatasnya, yang tersimpan didalamnya, dan segala sesuatu yang berada di atasnya. Sedangkan yang bukan tanah dirincikan pula pada benda yang berhak dan benda tetap.⁹ Benda bergerak minsalnya, kendaraan, ternak, dan yang menyangkut dengan gelar kebesaran. Adapun benda yang tidak bergerak, minsalnya rumah, gedung, dan sebagainya. Harta benda berupa tanah adalah sesuatu hal yang vital dalam kehidupan seseorang dan menempati kedudukan utama dari harta yang lain. Ia

⁹ Amir Saripuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islasm dalam Lingkungan Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1984) h. 212

juga dipandang sebagai salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Ditinjau dari segi bentuknya, harta terbagi pula kepada tanah hutan, tanah pertanian dan tanah ladang. Tanah hutan adalah yang belum diolah dan masih merupakan hutan liar. Tanah pertanian adalah tanah yang berawa-rawa yang diolah secara terus-menerus untuk tanaman pokok, misalnya padi, jagung, dan sebagainya. Adapun tanah ladang adalah tanah kering yang diolah untuk lahan pertanian, misalnya untuk tanaman palawija, rembutan dan sebagainya.
3. Ditinjau dari segi asalnya, yaitu bagaimana tata cara harta atau tanah itu berada di tangan seseorang, maka harta itu dapat pula dibagi kepada dua macam, yaitu harta yang diperoleh dari warisan dan dari hasil usaha sendiri. Harta warisan adalah harta seseorang yang telah meninggal dunia dan wafat pada tahun diwariskan kepada ahli warisnya. Ahli waris dapat memanfaatkan harta tersebut tanpa terikat lagi dengan hak orang lain didalamnya. Adapun harta yang diperoleh hasil usaha sendiri, yaitu segala hasil pencarian seseorang, baik dengan jalan tebas terbang, sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, petani, peternak, dan sebagainya. Termasuk juga dalam kelompok ini harta yang diperoleh melalui hibah, wasiat, dan seumpamanya.

Ditinjau dari hak penggunaannya, harta dapat pula dibedakan kepada hak ulayat (pertanian) dan hak perorangan. Hak ulayat adalah tanah hutan yang dikuasai oleh penghulu (kepala suku) dan belum dioleh sebagai tanah pertanian. Tanah itu dapat digarap, baik secara perorangan atau secara berkelompok dengan persyaratan tertentu. Adapun hak perorangan adalah tanah ulayat yang telah diusahakan oleh seseorang yang

dijadikan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Jadi bila tanah ulayat tersebut telah digarap oleh seseorang, maka stastusnya berubah menjadi tanah perorangan

Berdasarkan ketentuan tersebut, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing suami dan isteri, tidak bisa di ganggu atau di otak-atik oleh pasangannya.

BAB IV
KEDUDUKAN HARTA BAWAAN SETELAH MENINGGAL DUNIA
DI TINJAU MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
(Studi di Kecamatan Kampar Timur)

A. Kedudukan Harta Bawaan Setelah Meninggal Dunia Dalam Adat Kecamatan Kampar Timur

Harta bawaan adalah harta benda milik suami yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan baik diperoleh melalui penghibaan, warisan dan wasiat atau hasil dari usaha sendiri. Harta tempatan adalah harta benda milik isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau diperoleh melalui penghibaan, warisan dan wasiat atau hasil dari usaha sendiri. Sedangkan harta bersama adalah harta yang didapatkan oleh suami isteri selama dalam masa ikatan perkawinan.

Dalam adat kecamatan Kampar Timur dikenal tiga jenis harta dalam ikatan perkawinan, yaitu harta bawaan, harta tempatan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta benda milik suami yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan baik diperoleh melalui penghibaan, warisan dan wasiat atau hasil dari usaha sendiri. Harta tempatan adalah harta benda milik isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau diperoleh melalui penghibaan, warisan dan wasiat atau hasil dari usaha sendiri. Sedangkan harta bersama adalah harta yang didapatkan oleh suami isteri selama dalam masa ikatan perkawinan.¹

¹ Tuali Datuk Mangkuto Sindo (Ninik Mamak Persukuan Domo), *wawancara*, Desa Pulau Rambai, 03 Februari 2010.

Selama dalam masa perkawinan ketiga jenis harta tersebut dinikmati dan dimanfaatkan oleh suami isteri dan anak-anak secara bersama-sama. Tidak ada perbedaan ketiga jenis harta tersebut dalam hal pemakaian. Suami dan isteri menyebutkan bahwa semua jenis harta ini merupakan harta bersama dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan keluarga. Jadi walaupun secara hukum adat harta tersebut merupakan milik masing-masing suami isteri, akan tetapi secara *de facto* harta tersebut adalah harta bersama.

Permasalahan kemudian muncul setelah salah satu pihak dari suami atau isteri meninggal dunia. Menurut adat Kecamatan Kampar Timur ketiga jenis harta tersebut dibagikan berdasarkan pepatah adat "*Baghang yang ditopekti tingge, baghang yang dibaghok tobo, kok ado keuntungan dibagi*". Secara harpiah pepatah tersebut berarti "harta benda yang ditempati tinggal, harta benda yang dibawa dikembalikan, kalau ada keuntungan dibagi".

Pepatah adat di atas merupakan hukum (pasal) yang mengatur pembagian harta apabila terjadi perpisahan antara suami dan isteri, baik perpisahan tersebut dalam bentuk cerai hidup (terjadi perceraian antara suami dan isteri) maupun dalam bentuk cerai mati (salah satu pihak meninggal dunia). Dari pepatah adat tersebut bisa dipahami pembagian harta warisan adalah sebagai berikut :

Harta yang didapatkan oleh suami sebelum terjadinya pernikahan, seperti harta pemberian orang tuanya atau harta yang ia dapatkan dari hasil usahanya sendiri (biasanya disebut *Haroto Bujang*), maka harta tersebut akan dibawa kembali oleh suami ke rumah orang tuanya apabila terjadi perceraian atau dikembalikan kepada pihak keluarga suami apabila suami meninggal dunia.

Harta yang dimiliki oleh isteri sebelum terjadinya pernikahan, seperti pemberian orang tua atau hasil dari usaha sendiri, mutlak menjadi milik isteri. Sedangkan harta yang didapatkan selama masa perkawinan, maka harta itu dibagi oleh suami dan isteri dan harta itulah yang biasanya diwariskan kepada anak-anak apabila suami meninggal dunia.

Adapun bentuk-bentuk dari harta bawaan tersebut sebagai berikut:

1. Harta yang bergerak

Harta bergerak adalah harta yang bisa berpindah tempat dan bisa diambil manfaat dan hasilnya. Seperti mobil dan honda dan sebagainya.

2. Harta yang tidak bergerak

Harta tidak bergerak adalah yang tidak bisa berpindah ke suatu tempat tetapi harta tersebut bisa dapat diambil manfaat dan hasilnya. Seperti tanah, rumah, bangunan dan sebagainya.²

Untuk mengetahui adanya harta bawaan dan harta tempatan dalam sebuah pernikahan, maka setelah dilangsungkannya pernikahan diadakan acaran *makan basamo/Basighawang* antara keluarga kedua belah pihak. Dalam acara tersebut dikemukakan apakah dua orang suami isteri membawa harta ke dalam perkawinan mereka. Harta-harta yang dikemukakan dalam pertemuan inilah yang bisa diakomodir oleh mamak atau ninik mamak apabila nanti di kemudian hari terjadi pembagian harta baik yang disebabkan oleh perceraian maupun disebabkan oleh kematian salah satu pihak.

² H. Syahrin Datuk Samad Diraja (Ninik Mamak Persukuan Bendang), *wawancara*, Desa Koto Perambahan, 3 April 2010.

Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta, maka mamak dari kedua belah pihak akan membicarakan hal ini. Apabila mamak tidak menemukan suatu keputusan yang disepakati masing-masing pihak. Maka permasalahan ini akan diselesaikan oleh ninik.

Perlu dibahas di sini perbedaan antara mamak dan ninik mamak. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mamak

Dalam adat Kampar Timur mamak adalah seorang laki-laki yang merupakan adik dari ibu yang menjadi penanggung jawab atas setiap kemenakannya baik dalam acara adat pernikahan, kewarisan dan lain-lain sebagainya. Maka jika seseorang meninggal dunia yang kmenjadi penanggung jawab terjadinya permasalahan khususnya tentang masalah harta bawaan adalah mamak, namun apabila tidak dapat terselesaikan maka barulah diselesaikan oleh ninik mamak.

2. Ninik mamak

Ninik mamak adalah pemegang otoritas tertinggi dalam setiap kepala suku yang ada di Kecamatan Kampar Timur, dimana masing-masing suku dipimpin oleh setiap ninik mamak yang berjumlah delapan orang diantaranya adalah Suku Piliang, Suku Pitopang, Suku Melayu, Suku Kampai, Suku Domo, Suku Bendang, Pitopang Basah setelah seseorang meninggal dunia dalam adat Kampar Timur jika mamak tidak berhasil dalam menyelesaikan harta bawaan tersebut barulah diselesaikan oleh ninik mamak dengan cara bermusyawarah dengan seluruh keluarga yang meninggal dunia untuk mengetahui apakah ada harta yang di

bawah oleh yang meninggal dunia ke dalam rumah isterinya. Kalau seandainya ada maka harta tersebut harus diambil kembali oleh pihak keluarga yang meninggal dunia, setelah itu maka harta bawaan tersebut diserahkan kepada kemenakan. Setelah proses sudah selesai maka mulai di bagikan secara hukum adat.³

Di dalam kasus perceraian misalnya, harta bawaan suami akan dibawa pulang oleh suaminya ke rumah orang tua (*yang dibaghok tobo*). Seperti kendaraan, tanah dan harta lain yang telah dimiliki oleh suami sebelum terjadinya perkawinan, maka apabila terjadi perceraian, harta tersebut kembali menjadi milik suami dan bukanlah termasuk harta yang harus dibagi antara suami dan isteri.

Dalam kasus meninggalnya seorang suami, maka harta bawaan ini dikembalikan kepada pihak keluarga suami, yaitu orang tua suami. Apabila orang tuanya sudah tidak ada. Maka akan dimiliki oleh adik atau kemenakannya.

Hal ini dilakukan atas dasar kesukuan. Dalam adat Kecamatan Kampar Timur hubungan kesukuan ini (antara mamak dan kemenakan) sangat kuat sekali sehingga kemenakan bisa mewarisi harta yang ditinggalkan oleh mamak.⁴

B. Realisasi Pelaksannya

Untuk melihat realisasi ketentuan adat di atas si Kecamatan Kampar Timur, maka penulis mengadakan penelitian terhadap kasus-kasus yang terjadi sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 di beberapa desa, yaitu Desa Pulau Rambai, Desa Sawah

³ H. Miarip Datuk Temenggung (Ninik Mamak Persukuan Domo), *wawancara*, Desa Tanjung Bungo, 27 April 2010.

⁴ Maalib Datuk Besar (Ninik Mamak Persukuan Piliang), *wawancara*, Desa Pulau Rambai, 15 maret 2010.

Baru, Desa Kampar, Desa Sei Tarap, Desa Tanjung Bungo, Desa Koto Perambahan dan Desa Pulu Birandang.

Dari data yang penulis kumpulkan dapat penulis paparkan sebagai berikut :

Pada tahun 2006 di Dusun III Pulau Kampung Desa Pulau Rambai, Yanti menikah dengan Yulis. ketika itu Yulis sudah memiliki Sepeda Motor Merk Honda Supra dan sepeda motor tersebut dibawa ke dalam rumah tangga sebagai harta bawaan Yulis. Tahun 2008 Yulis meninggal dalam sebuah kecelakaan di sungai, sementara mereka belum dikaruniai anak. Setelah kematiannya keluarga Yulis tidak pernah menyinggung persoalan sepeda motor milik Yulis. Sadar akan aturan adat bahwa harta bawaan harus dikembalikan kepada keluarga yang meninggal dunia, keluarga Yanti (Orang tua Yanti, Pak Abbas dan Bu Ruzia) berniat mengembalikan sepeda motor tersebut kepada orang tua Yulis. Akan tetapi orang tua Yulis menolak dan merelakan sepeda motor tersebut dimanfaatkan dan dipakai oleh keluarga Yanti (orang tua Yanti karena Yanti tidak bisa mengendarai sepeda motor). Bahkan ketika Yanti kembali berumah tangga lagi pada tahun 2010 dengan Badul, sepeda motor tersebut dipakai oleh Badul yang merupakan suami kedua Yanti.

Kasus lain juga terjadi di Dusun III Pulau Kampung Desa Pulau Rambai, Jhoni menikah dengan seorang gadis bernama Dhila pada tahun 2007. Sebelum menikah Jhoni sudah memiliki sebuah Sepeda Motor Merk RX King hasil dari tabungannya sebagai seorang Polisi Pamong Praja di Kantor Camat Kampar Timur. Setelah satu tahun pernikahan mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Widia. Saat Widia berumur 6 Bulan, tepat pada bulan puasa, Jhoni meninggal di RS Umum Bangkinang karena serangan jantung. Setelah 40 hari kematian Jhoni, pihak

keluarga Jhoni (ayah dan ibunya) mengambil Sepeda Motor milik Jhoni di atas dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah *Haroto Bujang* Jhoni dan harus dikembalikan apabila terjadi perpisahan, baik cerai hidup maupun cerai mati. Dhila dan keluarganya tidak rela dan sempat meminta mamaknya untuk menanyakan hal ini kepada ninik mamak, akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena menurut ninik mamak hal ini harus berpatokan kepada pepatah adat yang mengatakan, “*baghang yang ditopekti tingge dan baghang yang dibaghak tobo kok ado keuntungan dibagi*”,⁵ maka sepeda motor tersebut memang harus dikembalikan kepada pihak keluarga (orang tua) Jhoni. Terakhir diketahui, bahwa sepeda motor tersebut sekarang dimanfaatkan oleh adik Jhoni yang masih sekolah di tingkat menengah.

Kasus lain yang terjadi di Desa Sei Tarap, pada tahun 2003 Firman menikah dengan Erda. Di saat menikah Firman tidak memiliki pekerjaan, oleh karena itu orang tuanya Bapak Midem dan Ibu Sinar membelikannya sebuah mobil Carry untuk dijadikan sebagai sarana mencari nafkah. Pada tahun 2010 Firman meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak yaitu Rizki (5 tahun), Rahmat (3 tahun) dan Tari (1 tahun). Setelah kematian Firman pihak keluarga Firman berniat mengambil kembali mobil tersebut. Menurut Pak Midem, dia berniat mengambil mobil tersebut dengan tujuan agar mobil tersebut bisa dimanfaatkan oleh adik Firman yang kebetulan masih bujangan dan tidak memiliki pekerjaan. Mobil tersebut dimaksudkan dimanfaatkan oleh Sardi, adik Firman, untuk mencari nafkah dan sebagian hasilnya nanti akan dipergunakan untuk keperluan anak-anak Firman. Akan tetapi keluarga

⁵ H. Syahrin Datuk Samad Diraja (Ninik Mamak Persukuan Bendang), *wawancara*, Desa Koto Perambahan, 3 April 2010.

Erda menolak maksud tersebut dan tidak mau menyerahkannya kepada keluarga Firman. Mereka berdalih bahwa walaupun mobil tersebut dibeli saat Firman belum berumah tangga, akan tetapi selama enam tahun usia pernikahan mereka mobil tersebut sering rusak dan Firman bersama istrinya Erda telah mengeluarkan banyak uang untuk perawatan mobil tersebut. Bahkan menurut mereka biaya perawatan yang mereka keluarkan jika dikumpulkan lebih besar dari pada harga mobil itu sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak mau mengembalikan, atau kalaupun memang harus mobil itu dikembalikan, mereka meminta biaya perawatan yang dikeluarkan selama ini juga dikembalikan kepada pihak keluarga isteri. Pada akhirnya masalah ini diselesaikan oleh ninik mamak dan diputuskan bahwa mobil itu dikembalikan kepada keluarga Firman. Akan tetapi mobil itu sampai sekarang masih belum diserahkan oleh pihak keluarga Erda.

Kasus lain di Desa Sei Tarap, tahun 2001 Herman menikah dengan Hasnah, Herman adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah memiliki kebun karet saat ia menikahi Hasnah. Pada tahun 2007 Herman meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan. Setelah lewat empat puluh hari kematian Herman, pihak keluarga Herman mengambil Kebun Karet berikut dengan surat tanahnya. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga Herman dan Hasnah dengan pertimbangan bahwa untuk keperluan anak Herman, Hasnah sudah memiliki uang pensiun Herman sebagai seorang PNS. Di samping itu, walaupun kebun karet tersebut sekarang dikuasai oleh orang tua Herman, akan tetapi setiap bulan ia harus menyisihkan sebagian hasil kebun karet tersebut untuk keperluan hidup dan sekolah anak Herman. Pertimbangan lain yang dikemukakan oleh keluarga

Herman adalah bahwa Hasnah masih muda dan masih terbuka kemungkinan bahwa dia akan menikah lagi. Kalau itu terjadi keluarga Herman takut harta yang diusahakan anaknya saat muda dulu jatuh ke tangan orang lain (suami kedua Hasnah).

Di Desa Tanjung Bungo juga ada kasus yang serupa. Pada tahun 2010 Awis meninggal dunia setelah tujuh tahun usia pernikahannya. Sebelum meninggal dunia Awis sudah memiliki sebidang tanah kaplingan ukuran 20 X 15 meter yang terletak di Panam Pekanbaru. Sampai hari kematiannya tanah tersebut masih belum dibangun. Setelah kematian Awis, tanah tersebut tetap berada di tangan isteri Awis, pihak keluarga Awis merelakan tanah tersebut dimiliki oleh isteri Awis dengan harapan suatu saat nanti tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh anak Awis yang saat ini masih duduk di kelas I SD.

Kasus lain terjadi di Desa Koto Perambahan. Usman anak Pak Haris meninggal dunia dengan meninggalkan isteri dan dua orang anak, sebelum meninggal dunia Usman telah membeli dua hektar tanah yang berisi kebun karet. Tanah tersebut dibeli dari hasil usaha sendiri dan dibawa kedalam rumah isterinya Aida. Saat Usman meninggal dunia pihak keluarga Pak Haris dan keluarga isteri Usman mengambil jalan tengah mengenai kedudukan tanah atau kebun karet tersebut. Tanah tersebut dibagi dua dan masing-masing keluarga Pak Haris sebagai orang tua Usman dan Aida sebagai isteri Usman mendapat jatah satu hektar. Hal ini telah dikomunikasikan dengan pihak ninik mamak dan pihak otoritas adat membenarkan hal ini selama tidak ada konflik di masing-masing pihak keluarga.⁶

⁶ Kasim. IS. Dt. Gindolelo, (Ninik Mamak Persukuan Melayu), *wawancara*, Koto Perambahan, 10 Februari 2010.

Di Desa Pulau Birandang juga ada kasus harta bawaan. Syukri, anak dari Pak Syukur, pada tahun 2005 menikah dengan Irma. Pada saat menikah dia sudah memiliki sepeda motor Merk Suzuki Thunder. Pada tahun 2009 Syukri meninggal. Oleh Pak Syukur, ayah Syukri, sepeda motor tersebut diambil dan keluarga Irma merelakan karena menurut mereka memang sudah seperti itu ketentuan adat mengatur.⁷

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2005, di Kecamatan Kampar Timur, khususnya di beberapa desa yang penulis teliti, telah terjadi tujuh kasus pembagian harta bawaan. Dari tujuh kasus tersebut, dua kasus harta bawaan menjadi milik isteri dengan kerelaan dari pihak keluarga suami yang meninggal dunia. Tiga kasus berakhir dengan penarikan harta bawaan oleh pihak keluarga suami. Satu kasus menjadi sengketa dan sampai sekarang masih belum selesai sedangkan satu kasus lagi berakhir dengan kompromi dengan cara membagi harta bawaan tersebut antara isteri dengan pihak keluarga suami yang meninggal dunia.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa aturan pembagian harta bawaan yang mengharuskan harta bawaan tersebut harus dikembalikan kepada pihak keluarga suami yang meninggal dunia, tidak sepenuhnya dilaksanakan di tengah masyarakat Kecamatan Kampar Timur. Dari tujuh kasus yang dipaparkan, hanya tiga kasus yang sesuai aturan adat dengan kata lain hanya sekitar 44,44 % masyarakat Kecamatan Kampar Timur melaksanakan aturan ini.

C. Tinjauan Hukum Waris Islam

⁷ Haidir, Dt. Marajo, (Ninik Mamak Persukuan Kampai), *wawancara*, Pulau Kampung 13 Maret 2010.

Menurut hukum fikih Islam tirkah/mauruts (harta peninggalan) adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit (orang yang meninggal) secara mutlak.⁸ Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, ada beberapa hak mayat yang harus dilaksanakan. Hak-hak tersebut adalah :

1. Tajhiz

Tajhiz adalah biaya-biaya perawatan yang diperlukan oleh orang yang meninggal, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya.

2. Hutang Piutang

Sebelum harta dibagikan maka terlebih dahulu harus dilunasi hutang si mayit kalau seandainya dia masih meninggalkan hutang yang belum dilunasi.

3. Wasiat

Wasiat adalah memberikan hak memiliki secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat. Dalam fikih Islam ditetapkan bahwa jumlah maksimal harta yang boleh diwasiatkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Hukum Islam tidak mengenal adanya harta bawaan, harta bersama atau istilah lainnya. Kalaupun ada hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan, itu hanya terbatas pada tiga hal di atas. Di samping itu, huruf ” ” yang terdapat di dalam surat an-Nisa’ ayat 7 (*Mimma Taraka..*) mengandung arti apa-apa, yang juga masih bersifat umum, mencakup semua yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Bahkan ulama Malikiyyah,

⁸ Sayyid Sabiq *Fikih Sunnah Jilid 14*, , terj. Mudzakir AS, (Bandung : Al-Ma’arif, 1997), cet. Ke-9, h. 238.

⁹ Fatchrurrahman, *Ilmu waris*, (Bandung: al-Ma’arif, 1981), Cetakan Kedua, h. 45.

Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan dan non kebendaan.

Menurut Fatchur Rahman, tirkah ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk dipusakai para ahli waris. Yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia ialah benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, hak-hak kebendaan, hak-hak non kebendaan maupun benda-benda yang masih terkait dengan orang lain.

Di samping hal di atas, dalam pembagian harta warisan yang perlu juga diperhatikan adalah azaz ijbari. Unsur Ijbari dalam hukum kewarisan Islam ditinjau dari tiga segi, yaitu :

1. Dari segi peralihan harta kepada ahli waris. hal ini didasarkan kepada firman Allah swt yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian dari dari harta peninggalan orang tua atau kerabatnya. Dari kata ini dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan, disadari atau tidak,

¹⁰ Depag R.I., *op cit.*, h. 116.

- terdapat hak ahli waris. Oleh sebab itu, orang yang akan mewariskan tidak perlu menjanjikan akan memberi harta sebelum ia meninggal dunia.
2. Dari segi jumlah harta yang diterima. Berdasarkan surat An-Nisa' di atas, Nashiban Mafrudhan berarti perhitungan atau bagian yang telah ditentukan. Jadi orang yang mewariskan atau ahli waris tidak berhak menambah atau mengurangnya.
 3. Dari segi komposisi ahli waris itu sendiri, berdasarkan kepada hubungan-hubungan tertentu secara pasti yang digali dari Nash, yaitu yang dapat dipahami dalam Surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Keseluruhan ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima warisan dari seseorang yang meninggal dunia.

Kata Fara'idh adalah bentuk jamak dari kata Fardhu yang berarti ketentuan (Taqdir) karena bagian-bagian harta yang diberikan kepada ahli waris telah ditentukan. Tidak boleh mengganti bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syara' bagi setiap ahli waris karena perbuatan kufur terhadap Allah. Imam Syaukani dalam kitab tafsirnya, sebagaimana dikutip oleh Saleh al-Fauzan, mengatakan bahwa kata "*Tilka*" (itu) yang terdapat di dalam surat an-Nisa' ayat 13 merupakan isyarat untuk menunjuk bahwa hukum-hukum yang telah disebutkan yaitu hukum-hukum waris. Allah menamakan hukum-hukum tersebut sebagai *Hudud*, disebabkan hukum-hukum tersebut tidak boleh dilewati batasnya dan tidak boleh dilanggar.¹¹

Allah telah menetapkan orang-orang yang berhak menerima warisan. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh

¹¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayy al-Kattani dkk, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), cet. Ke-1, h. 562.

pewaris. Munculnya ahli waris disebabkan adanya faktor penyebab hubungan kewarisan. Oleh sebab itu, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua, yaitu ahli waris dalam hubungan kerabat (*nasabiyah*). Bentuk ini akan dirinci lagi kepada *furu'ul mayyit*, *ushulul mayyit*, dan kerabata menyamping (*al-hawasyi*). Dan ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang disebabkan memerdekakan budak (*wala' ul-'ataqah*). Rinciannya adalah:

1. Ahli waris *nasabiyah* (hubungan kerabat). Ahli waris dalam hubungan ini yang tergolong kepada *furu'ul mayyit* ialah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Dan ahli waris *nasabiyah* yang termasuk kedalam kategori *ushulul mayyit* ialah ayah, ibu, kakek dan nenek. Sedangkan hubungan nasab yang dikategorikan *al-hawasyi* (garis kerabat kesamping) ialah saudara (laki-laki dan perempuan), baik hubungan kandung, seayah maupun seibu, anak saudara, paman dan anak paman.
2. Ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris dalam hubungan perkawinan yaitu suami dan isteri, dan ahli waris yang disebabkan karena memerdekakan budak. Untuk jelasnya maka dirincikan para ahli waris tersebut diatas adalah sebagai berikut: menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu.

Berdasarkan besar harta yang diterima ahli waris terbagi kepada tiga macam, yaitu :

- a. Ashabah

Ashabah adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya. Mereka akan mendapat sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada Dzawil Furud atau mereka akan mendapat semua harta peninggalan jika tidak ada Dzawil Furud.

b. Dzawil furudh

Dzawil furudh yaitu kerabat (ahli) mayat yang mendapat bagian waris tertentu atau mendapat sisa bagian atau mendapatkan dua bagian. Kerabat (ahli) mayat yang mendapatkan bagian warisan ini ada 10 orang, yaitu :

1. Ayah
2. Ibu
3. Kakek (ayahnya ayah) ke atas
4. Nenek (ibunya ibu) ke atas
5. Anak perempuan
6. Cucu perempuan pancar laki-laki ke bawah
7. Saudari sekandung
8. Saudari seayah
9. Saudari seibu
10. Saudara seibu

c. Dzawil arham

Dzawil arham adalah setiap kerabat yang bukan Dzawil Furud dan bukan pula Ashaba. yaitu orang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, Dzawil arham biasanya adalah kerabat yang dihubungkan oleh garis wanita dengan si mayit.¹²

¹² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), Cetakan Kedua h. 384.

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan Dzawil Arham, pendapat pertama mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hak kewarisan sama sekali. Di antara yang berpendapat demikian adalah Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Said bin Musayyab, Sufyan Tsauri, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

Pendapat kedua mengatakan bahwa mereka mendapatkan warisan apabila mendapatkan warisan apabila tidak ada Ashabah atau Dzawil Furud. Pendapat ini dipegang oleh Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal.¹³

Dari penjelasan di atas, mengenai aturan adat Kecamatan Kampar Timur tentang harta bawaan serta aturan Islam tentang pembagian harta warisan, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan pembagian harta bawaan yang ada di Kecamatan Kampar Timur tidak sesuai dengan hukum Islam dengan alasan sebagai berikut:

1. Pembagian harta menjadi harta bawaan, harta tempatan dan harta bersama tidak dikenal dalam Fikih Islam, setiap harta yang ditinggalkan oleh si mayit merupakan harta warisan tanpa harus dipandang sumber dari mana ia beraal. Oleh karena itu semua harta peninggalan harus dibagikan sebagai harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Bagian yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan agama karena pembagiannya berdasarkan asal harta (dari mana harta berasal), apakah harta tersebut harta bawaan, tempatan atau harta bersama. Bukan didasarkan atas ketentuan al-Qur'an yang telah menetapkan besaran harta masing-masing seperti sekian persen harta untuk masing-masing ahli waris yang berhak. Hal ini bertentangan dengan azaz

¹³ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. Ke-1, h. 309-310.

ijbari yang menjelaskan bahwa ketentuan besaran harta yang diterima merupakan ketentuan yang harus dijalankan oleh semua pihak.

3. Adanya ahli waris yang seharusnya tidak menerima warisan, akan tetapi hukum adat memposisikan mereka sebagai penerima harta peninggalan. Seperti adik adik yang menerima harta bawaan kakaknya, padahal adik adalah *Hawasyi* yang terhibab dengan keberadaan anak (*furu'*) atau ayah (*Ashal*) si mayit. Contoh lain adalah kemenakan yang menerima harta peninggalan mamaknya, padahal kemenakan tergolong kepada dzawil arham yang walaupun mempunyai hubungan kekerabatan dengan si mayit, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk menerima warisan selama Ashaba atau Dzawil Furud masih ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan harta bawaan setelah meninggal di Kecamatan Kampar Timur itu diambil kembali oleh pihak keluarga yang meninggal dunia, seperti orang tua atau kemenakan yang meninggal dunia.
2. Tidak semua masyarakat Kecamatan Kampar Timur yang melaksanakan aturan adat ini.
3. Aturan adat Kecamatan Kampar Timur tentang kedudukan dan pembagian harta bawaan setelah meninggal dunia tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat penulis sarankan sebagai berikut :

1. Kepada pemuka adat agar lebih meneliti dalam pembagian harta warisan sehingga sesuai dengan syariat Islam sehingga terwujud *Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.
2. Kepada pemuka dan tokoh agama agar bisa memberikan penjelasan tentang hukum Islam kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum waris.
3. Kepada akademisi agar melanjutkan penelitian tentang persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), Cet. Ke-1

Abu Daud Sulaiman bin Asy'at al-Sijistani, *Sunan Abi Daud Juz 3*, (Kairo : Mustafa al-Babi, 1952), Cet. ke-1

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Kairo : Dar al-Fikri al-Arabi, tt), Cet. Ke-1

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Jami'al-Shahih lil Bukhari Juz 2*, (Cairo : Maktabah Salafiyah, 1981), Cet. ke-1

Dahlan, Abdul Aziz, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. Ke-1

Depag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), cet. Ke-1

Djakfar, Idris, dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1995), Cet. Ke-1

Doi, Rahman, I, *Syari'ah II Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1996), Cet.ke-1

Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), Cetakan Ke-2

Fauzan, Saleh al-, *Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayy al-Kattani dkk, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), cet. Ke-1, h. 562.

Syata, Said al-Bakri Muhammad, *I'anatu at-Thalibin*, (Kairo: Mustfa al-Babi al-Halabi,tt), Cetakan Ke-2

Hajar M., *Fiqh Mawaris*, (Pekanbaru : IAN Susqa, 1989), Cet. Ke-1

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar-al-Qalam, 1979), cet, ke-1

Lubis, Suhra Wardi K., dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris, (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet. Ke-1

Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), Cetakan Ke-2

Muslim, *Shahih Bukhari*, (Cairo: Darul Fikri, 1981), cet. Ke-1

Putra Karya Medan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Medan: Redaksi Simuabua Mitra Usaha, 1995), Ce. Ke-1

Qurtuby, Muhammad bin Ahmad al-, *al-Jami'u li Ahkami al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Katib al-Ilmiyah, 1993), Cet.ke-3

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Cetakan Ke-2

_____, *Fiqh Mawarits*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-2

Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), Cet. Ke-1

Sabiq,Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 14*, , terj. Mudzakir AS, (Bandung : Al-Ma'arif, 1997), cet. Ke-9, h. 238.

Shabuni, Muhammad Ali ash-, *Hukum Waris dalam syari'at Islam*, Ali Bahasa Samhuji Yahya, (Bandung: Ponegoro, 1995), Cetakan ke-2

Shiddiqy, Muhammad Hasbi Ash-, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1972), Cet. Ke-1

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata.*, (Hakarta : Praty Paramita, 1989), cet. Ke-1

Usman, Dian Kirul, *Fiqhu Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-4

Zubadi,Zunaidi Ahmad al-, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Semarang: Thoha Putra, 1989), Cet. Ke-2

DAFTAR TABEL

Halaman

Table 1	Luas Daerah Dan Jumlah Penduduk Kecamatan Kampar Timur ..	18
Tabel 2	Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Kampar Timur	20
Tabel 3	Komposisi Jumlah Sarana Ibadah Di Kecamatan Kampar Timur	21
Tabel 4	Komposisi Jumlah Sarana Pendidikan Agama Di Kecamatan Kampar Timur	22
Tabel 5	Komposisi Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Kampar Timur	23

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama	: Addinal Khairi
Tempat/ Tgl. Lahir	: Kampar, 19 Juli 1984
Status	: Kawin
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	- Penyuluh Agama Islam NON PNS Kantor Kementerian Agama Propinsi Riau - PDTA Amanatul Jihad Todak - Privat / Guru Ngaji
Alamat Indah	: Jalan Selada no 94 Perumahan Arengka Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru

II. Identitas Orang Tua

Nama Ibu	: Zannuraini (Almh)
Nama Ayah	: M. Nur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Alamat	: Tangjung Alai Hilir Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampar Timur

Menerangkan dengan sesungguhnya :

I. Pendidikan Formal (dijabarkan dari SD s/d terakhir)

1. SDN 062 Kampar (1997)
2. MTS. Islamic Centre Al-Hidayah Kampar (2001)
3. MAK. Islamic Centre Al-Hidayah Kampar (2004)

II. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Ikatan Remaja Masjid se Kelurahan Delima Tampan
(2005 – 2010)
2. Anggota BEM Fakultas (2007)
3. Anggota PPP Kota Pekanbaru (2008)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 09 Mei 2011

Saya yang bersangkutan,

(Addinal Khairi)

